



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA WANITA
DI INDONESIA TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

Oleh

Rochmatul Mega Hafijriyah

NIM. 140810101133

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA WANITA
DI INDONESIA TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Rochmatul Mega Hafijriyah

NIM. 140810101133

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati serta ungkapan rasa syukur yang tulus kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Ila Choiriyah dan Ayahanda M. Hafid, yang senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada ananda hingga saat ini, mendidik Penulis dengan penuh kesabaran serta dengan ketulusan hati dan kasih sayang, dan selalu menjadi inspirasi serta motivasi bagi ananda untuk meraih cita-cita.
2. Adikku Nikmatul Lovy Hafitriyah yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam setiap perjalanan yang ditempuh oleh ananda untuk pendapat ilmu yang bermanfaat.
3. Guru-guruku yang terhormat mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai serta membimbing Penulis dengan penuh kesabaran.
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Alam Nasyrah : 6)

Untuk jadi maju memang banyak hambatan. Kecewa semenit dua menit boleh, tetapi setelah itu harus bangkit lagi.

(Joko Widodo)

Kesuksesan bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tetapi seberapa besar kamu bias membawa perubahan untuk hidup orang lain.

(Michelle Obama)

Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu.

(Andrea Hirata – Sang Pemimpi)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rochmatul Mega Hafijriyah

NIM : 140810101133

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Indonesia Tahun 2012-2016” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Mei 2018

Yang menyatakan,

Rochmatul Mega Hafijriyah
140810101133

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA WANITA
DI INDONESIA TAHUN 2012-2016**

Oleh:

Rochmatul Mega Hafijriyah

NIM 140810101133

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dra. Nanik Istiyani, M.Si

Dosen Pembimbing II : Fivien Muslihatinningsih, S.E., M.Si

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja Wanita di Indonesia Tahun 2012-2016
Nama Mahasiswa : Rochmatul Mega Hafijriyah
NIM : 140810101133
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Tanggal Persetujuan : 7 Mei 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Nanik Istiyani, M.Si
NIP. 196101221987022002

Fivien Muslihatinningsih, S.E., M.Si
NIP. 198301162008122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes
NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA WANITA
DI INDONESIA TAHUN 2012-2016**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rochmatul Mega Hafijriyah

NIM : 140810101133

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

13 Juli 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si. (.....)
NIP. 196004121987021001
2. Sekretaris : Dr. Endah Kurnia Lestari, S.E, M. E. (.....)
NIP. 197804142001122003
3. Anggota : Dr. Sebastiana Viphindartin. M.Kes (.....)
NIP. 196411081989022001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Pelaksana Harian Dekan,

Dr. Zainuri, M.Si
NIP. 196403251989021001

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita
Di Indonesia Tahun 2012-2016

Rochmatul Mega Hafijriyah

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi, investasi, dan jumlah wanita yang bekerja terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel, data yang digunakan berupa time series (tahun 2012-2016) dan cross section (33 Provinsi di Indonesia). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier data panel dengan metode Fixed Effect digunakan alat bantu software Eviews 9.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upah minimum provinsi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia tahun 2012-2016, investasi mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia tahun 2012-2016, dan jumlah wanita yang bekerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia tahun 2012-2016.

Kata Kunci : Upah Minimum Provinsi, Investasi, Jumlah Penduduk Wanita yang Bekerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita

Factors That Affect Women's Labour Force Participation Rate Period 2012-2016

Rochmatul Mega Hafijriyah

*Department of Economics and Development Study, the Faculty of Economics and
Business, the University of Jember*

ABSTRACT

This research aims to know the influence of provincial minimum wages, investments, and the number of women worker against women's labour force participation rate. This research is quantitative research using data panel, the data used in the form of time series (in 2012-2016) and cross section (33 province in Indonesia). Types of data used in this research is secondary data obtained from the Central Bureau of statistics (BPS) and the capital investment Coordinating Agency (BKPM). Methods of analysis used is the method of linear regression analysis with the method of panel data Fixed Effects used tools software Eviews 9.

This research concluded that the province's minimum wage has a negative and significant effect against the labour force participation rate of women in Indonesia 2012-2016 years, investment has a positive influence and not significantly to labour force participation rate of women in Indonesia year of 2012-2016, and the number of women worker has a positive and significant effect against the labour force participation rate of women in Indonesia year of 2012-2016.

Keywords: Minimum wage, investments, the number of women worker, women's labour force participation rate

RINGKASAN

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Indonesia Tahun 2012-2016, Rochmatul Mega Hafijriyah, 140810101133, 2018, halaman, Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Pembangunan ekonomi di suatu negara tentunya tidak bisa terlepas dari keikutsertaan seluruh komponen masyarakat, tidak terkecuali peranan wanita didalamnya. Populasi wanita di dunia yang kini hampir mencapai setengah dari populasi dunia secara keseluruhan dengan perbandingan rasio 976 : 1000 terhadap laki-laki (World Bank, 2015), memberikan peranan penting bagi wanita untuk kegiatan ekonomi yang selama sepertiga terakhir abad ke-20 ini juga memasukkan jutaan kaum wanita ke dalam angkatan kerja. Hasil pembangunan yang telah dicapai suatu negara antara lain dapat dilihat dari peningkatan peran wanita di lingkungan masyarakat, khususnya dalam kegiatan ekonomi.

Negara Indonesia sebagai sebuah negara yang masih berkembang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan Sensus Penduduk 2015, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 255.182.144 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 128.231.889 dan penduduk wanita sebanyak 126.950.255 jiwa atau 49 persen dari jumlah total penduduk. Data tersebut menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia di Indonesia sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai tenaga kerja guna meningkatkan pembangunan ekonomi, tak terkecuali kaum wanita Indonesia jika dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik. Namun tidak semua penduduk Indonesia bisa dikatakan penduduk yang dapat ikut sertadan aktif dalam perekonomian.atau economically active population.

Menurut Sensus Penduduk tahun 2015, tingkat usia produktif bagi perempuan lebih banyak daripada laki-laki, namun tingkat partisipasi dan penyerapan tenaga kerja perempuan maupun kegiatan ekonomi mandiri lebih rendah daripada laki-laki. Akses perempuan terhadap kesempatan dan sumberdaya yang mampu mempengaruhi struktur ekonomi dalam masyarakat sangat rendah. Dalam sektor informal lebih banyak memilih di bidang perdagangan bahan

pangan, pertanian produksi skala kecil dan sebagainya. Partisipasi yang aktif antara laki-laki dan perempuan secara seimbang akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Dalam beberapa aspek pembangunan, perempuan kurang dapat berperan aktif. Hal ini dikarenakan oleh kondisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki, seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses sumber-sumber ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia, sistem upah yang masih diskriminatif, serta tingkat pendidikan yang kurang memadai.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia tahun 2012-2016. Selain itu penelitian juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor tersebut. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi linear data panel dengan bantuan software *E-Views*.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien regresi variabel upah minimum provinsi sebesar 0,034539, artinya setiap kenaikan Rp 1.000.000,00 upah minimum provinsi akan menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia sebesar antilog 0,034539 atau 1,1 persen. Nilai koefisien regresi variabel investasi 0,007984, artinya setiap kenaikan Rp 1.000.000,00 investasi dalam negeri akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia sebesar antilog 0,007984 atau 1 persen. Nilai koefisien regresi variabel jumlah penduduk wanita yang bekerja sebesar 0,263188, artinya setiap kenaikan 1 juta jumlah penduduk wanita yang bekerja akan menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia sebesar antilog 0,263188 atau 1,8 persen.

Kesimpulan dari skripsi ini menunjukkan bahwa upah minimum provinsi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia tahun 2012-2016, investasi mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia tahun 2012-2016, dan jumlah wanita yang bekerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia tahun 2012-2016.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah, berkah serta ridho-Nya dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW atas petunjuk yang telah diberikan kepada umatnya mulai zaman jahiliyah hingga menuju jalan kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Indonesia Tahun 2012-2016”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik motivasi, nasehat, dorongan, kasih sayang, dan kritik yang positif dan membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Nanik Istiyani, M.Si selaku Dosen Pembimbing utama yang telah memberikan banyak waktu luang, tenaga serta pikiran untuk membimbing, memberikan arahan, berbagai kritik dan saran yang membangun bagi penulis, kesabaran, keikhlasan, serta ketulusan yang tak ternilai dalam membantu menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Fivien Muslihatinningsih, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan dalam penyusunan skripsi. Serta dengan ikhlas membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang S1;
3. Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama kuliah terimakasih atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;

5. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember;
6. Ketua Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
8. Ibunda Ila Choiriyah, ayahanda M. Hafid terima kasih yang tulus penulis ucapkan atas doa yang terus dipanjatkan untuk ananda, dukungan, semangat, kasih sayang yang tulus, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan pengorbanan yang sampai saat ini diberikan tidak dapat dinilai oleh apapun.
9. Sahabat sekaligus keluarga, Wanda, Lely, Sa'diyah, Rini terima kasih banyak atas waktu luang yang selalu kalian berikan, dukungan, dan semangat yang memotivasi penulis.
10. Keluarga besar KKN 42 Desa Kedunglo Kec. Asembagus Kab. Situbondo atas segala dukungan dan doa yang telah kalian berikan.
11. The Preanger Squad yang telah memberikan semangat, doa, dan pengalaman kepada penulis.
12. EXO, Bigbang, BTS, Wanna One, Red Velvet, dan Blackpink telah menjadi penyemangat melalui musik yang kalian ciptakan.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 7 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi Malthus	10
2.1.2 Konsep Tenaga Kerja	11
2.1.3 Definisi dan Peraturan Upah Minimum Provinsi	17
2.1.4 Definisi Investasi, Jenis Investasi, dan Fungsi Investasi	20

2.1.5 Penduduk Wanita yang Bekerja dan Penawaran Tenaga Kerja .	23
2.1.6 Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita	25
2.1.7 Pengaruh Investasi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita.....	27
2.1.8 Pengaruh Jumlah Penduduk Wanita yang Bekerja terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita.....	28
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka konseptual	35
2.4 Hipotesis Penelitian	37
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
3.2 Unit Analisis	38
3.3 Jenis dan Sumber Data	38
3.4 Metode Analisis Data.....	39
3.4.1 Regresi Data Panel.....	39
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	42
3.4.3 Pemilihan Model Estimasi Regresi dalam Data Panel	43
3.4.4 Pengujian Parameter Model / Uji Hipotesis	45
3.5 Definisi Operasional Variabel	46
BAB 4. PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	48
4.1.1 Kondisi Geografis Indonesia	48
4.1.2 Perekonomian Indonesia.....	49
4.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Indonesia	53
4.1.4 Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia	54
4.1.5 Investasi di Indonesia	56
4.1.6 Jumlah Penduduk Wanita yang Bekerja	58
4.2 Analisis Data	60
4.2.1 Analisis Hasil Estimasi dengan <i>Panel Data</i>	60

4.2.2 Model Terbaik Panel Data : Fixed Effect Model (FEM).....	62
4.2.3 Uji Kesesuaian (Test Goodness of Fit)	63
4.2.4 Uji Asumsi Klasik	66
4.3 Pembahasan	68
4.3.1 Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia 2012-2016	69
4.3.2 Pengaruh Investasi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Indonesia 2012-2016.....	72
4.3.3 Pengaruh Jumlah Wanita yang Bekerja terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Indonesia 2012-2016	73
BAB 5. PENUTUP.....	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2016	7
Tabel 1.2	Perkembangan Investasi di Indonesia Tahun 2012-2016	7
Tabel 1.3	Perkembangan Penduduk Wanita yang Bekerja di Indonesia Tahun 2012-2016.....	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Setiap Provinsi Di Indonesia Tahun 2012-2016 (Persen/Tahun) ..	53
Tabel 4.2	Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Setiap Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2016 (Rupiah/Bulan)	55
Tabel 4.3	Perkembangan Investasi Di Setiap Provinsi Di Indonesia Tahun 2012-2016 (Miliar Rupiah/Tahun).....	56
Tabel 4.4	Perkembangan Jumlah Penduduk Wanita yang Bekerja di Setiap Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2016 (jiwa/tahun)	59
Tabel 4.5	Perbandingan Estimasi Panel Data Model CEM, FEM, dan REM	60
Tabel 4.6	Uji Chow	61
Tabel 4.7	Uji Hausman	61
Tabel 4.8	Fixed Effect Model	62
Tabel 4.9	Nilai Log Koefisien dan Antilog Koefisien.....	62
Tabel 4.10	Uji F Simultan.....	64
Tabel 4.11	Uji t-statistik	64
Tabel 4.12	Koefisien Determinasi (R^2).....	65
Tabel 4.13	Uji Heteroskedastisitas	66
Tabel 4.14	Uji Multikolinearitas	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja di Indonesia.....	4
Gambar 1.2	Perbandingan TPAK wanita dengan TPAK laki-laki di Indonesia, 1961-2016	5
Gambar 2.1	Komposisi Penduduk dan Tenagakerja	16
Gambar 2.2	Kerangka Konseptual	35
Gambar 4.1	Uji Normalitas	67

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A. Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, Investasi, Jumlah Penduduk Wanita yang Bekerja di 33 Provinsi di Indonesia 2012-2016.....	81
Lampiran B. Hasil Olah Log Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, Investasi, Jumlah Penduduk Wanita yang Bekerja di 33 Provinsi di Indonesia 2012-2016	87
Lampiran C. Hasil Estimasi Panel Data Model Common Effect Model.....	93
Lampiran D. Hasil Estimasi Panel Data Model Fixed Effect Model.....	94
Lampiran E. Hasil Estimasi Panel Data Model Random Effect Model	95
Lampiran F. Uji Chow	96
Lampiran G. Uji Hausman	97
Lampiran H. Uji Heteroskedastisitas	98
Lampiran I. Uji Normalitas	99
Lampiran J. Uji Multikolinearitas	100
Lampiran K. Nilai Log Koefisien dan Antilog Koefisien.....	101

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di suatu negara tentunya tidak bisa terlepas dari keikutsertaan seluruh komponen masyarakat, tidak terkecuali peranan wanita didalamnya. Populasi wanita di dunia yang kini hampir mencapai setengah dari populasi dunia secara keseluruhan dengan perbandingan rasio 976 : 1000 terhadap laki-laki (World Bank, 2015), memberikan peranan penting bagi wanita untuk kegiatan ekonomi yang selama sepertiga terakhir abad ke-20 ini juga memasukkan jutaan kaum wanita ke dalam angkatan kerja. Hasil pembangunan yang telah dicapai suatu negara antara lain dapat dilihat dari peningkatan peran wanita di lingkungan masyarakat, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Bila sebelumnya wanita hanya berperan sebagai pengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga, maka saat ini semakin banyak wanita yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Namun partisipasi wanita dalam dunia angkatan kerja masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah wanita secara keseluruhan yang menandakan bahwa sumber daya manusia masih belum dimanfaatkan dengan baik. Jika kesetaraan *gender* antara pekerja wanita dengan laki-laki dapat lebih dikembangkan, maka pembangunan ekonomi suatu negara dapat meningkat dan memberikan lebih banyak kesejahteraan untuk penduduknya.

Negara Indonesia sebagai sebuah negara yang masih berkembang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan Sensus Penduduk 2015, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 255.182.144 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 128.231.889 dan penduduk wanita sebanyak 126.950.255 jiwa atau 49 persen dari jumlah total penduduk. Data tersebut menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia di Indonesia sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai tenaga kerja guna meningkatkan pembangunan ekonomi, tak terkecuali kaum wanita Indonesia jika dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik. Namun tidak semua penduduk Indonesia bisa dikatakan penduduk yang dapat ikut sertadan aktif dalam perekonomian.atau

economically active population. Menurut Badan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), penduduk yang dapat dikatakan aktif secara ekonomi adalah penduduk usia 15-64 tahun yang aktif atau berusaha aktif memproduksi barang atau jasa.

Menurut Sensus Penduduk tahun 2015, tingkat usia produktif bagi perempuan lebih banyak daripada laki-laki, namun tingkat partisipasi dan penyerapan tenaga kerja perempuan maupun kegiatan ekonomi mandiri lebih rendah daripada laki-laki. Akses perempuan terhadap kesempatan dan sumberdaya yang mampu mempengaruhi struktur ekonomi dalam masyarakat sangat rendah. Dalam sektor informal lebih banyak memilih di bidang perdagangan bahan pangan, pertanian produksi skala kecil dan sebagainya. Partisipasi yang aktif antara laki-laki dan perempuan secara seimbang akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Dalam beberapa aspek pembangunan, perempuan kurang dapat berperan aktif. Hal ini dikarenakan oleh kondisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki, seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses sumber-sumber ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia, sistem upah yang masih diskriminatif, serta tingkat pendidikan yang kurang memadai.

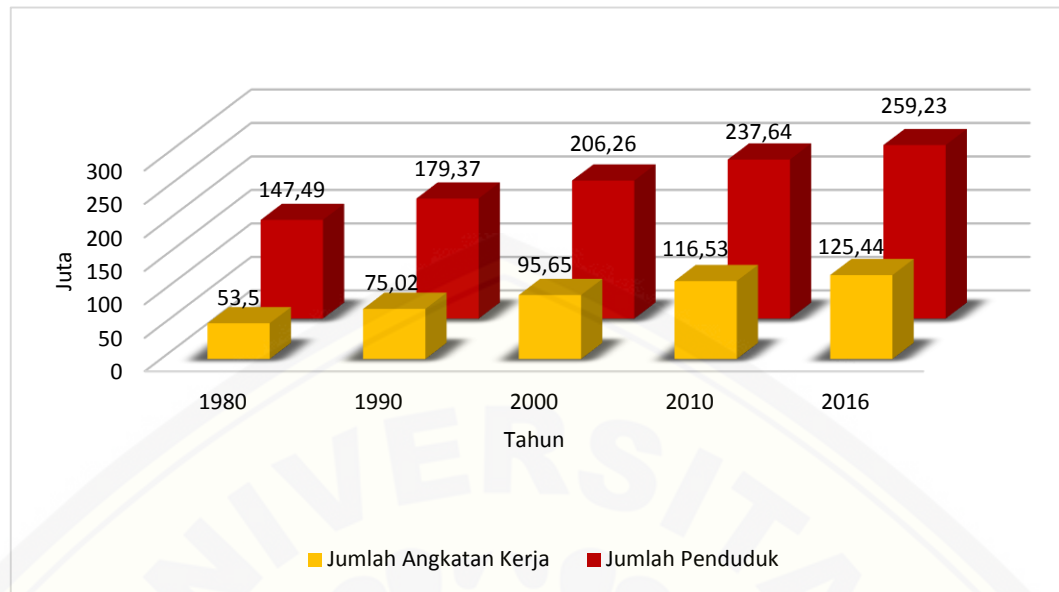
Biro Pusat Statistik sebagai pengumpul data ketenagakerjaan di Indonesia menggunakan metode pendekatan angkatan kerja (*Labor Force Approach*) sejak diadakannya Sensus Penduduk tahun 1961 untuk menjelaskan tentang penduduk yang aktif. Demikian pula pendekatan ini banyak digunakan negara-negara lain, baik negara maju maupun negara berkembang, sehingga komparabilitasnya dapat dijamin. Tidak semua penduduk Indonesia bisa dikatakan penduduk yang dapat ikut serta dan aktif dalam perekonomian atau *economically active population*.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai gambaran penduduk yang aktif secara ekonomi terdapat suatu indikator yang bisa menjelaskannya, indikator ini disebut dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK ialah rasio perbandingan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja dengan jumlah penduduk dalam kategori usia kerja (15 tahun keatas). Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja

menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian (Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSA), Badan Pusat Statistik 2015).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita di beberapa negara maju menunjukkan angka yang tinggi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja wanita tahun 2012 di negara Kanada sebesar 62 persen, di Perancis 51 persen, di Jerman sebesar 54 persen, di Swedia sebesar 60 persen, dan di Amerika Serikat sebesar 57 persen. Sebaliknya, pada beberapa negara berkembang, TPAK wanita menunjukkan kecenderungan yang menurun. Contohnya di negara Turki, TPAK wanita menurun dari 30 persen pada tahun 1999 menjadi 24 persen pada tahun 2008 (World Bank, 2017).

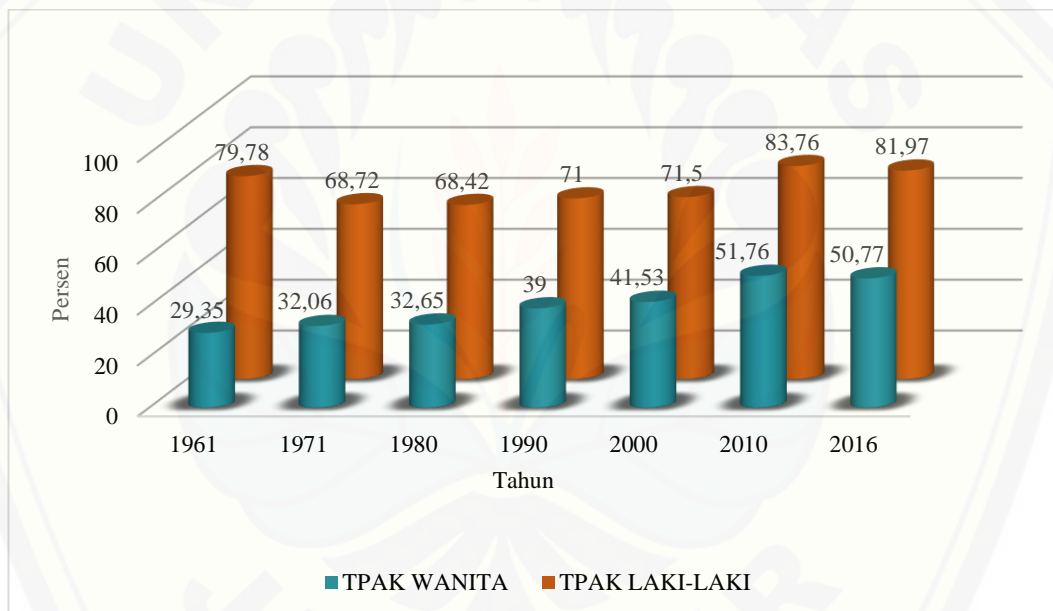
Dengan adanya gambaran dari tingkat partisipasi angkatan kerja di beberapa negara di dunia, baik yang berkembang maupun yang maju, pada Gambar 1.1 menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja di Indonesia dari tahun 1980 sampai 2016. Angkatan kerja terus mengalami peningkatan jumlah dari 53,5 juta pada tahun 1980, menjadi 75,02 juta pada tahun 1990, 95,65 juta pada tahun 2000, 116,53 juta di tahun 2010, hingga 259,23 juta pada tahun 2016. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja lebih cepat daripada jumlah penduduk, terutama karena meningkatnya jumlah partisipasi angkatan kerja wanita.



Gambar 1.1 Perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja di Indonesia (Sumber: BPS, data diolah)

Peningkatan peran wanita dalam pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan, termasuk peran wanita dalam pembangunan ekonomi. Keterlibatan wanita dalam pembangunan ekonomi cukup meningkat. Selama kurun waktu 50 tahun terakhir, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia mengalami peningkatan secara terus-menerus. Berdasarkan laporan “Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 1961-1980” yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), persentase tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia tahun 1961 baru mencapai angka 29,35 persen, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki di tahun yang sama mencapai angka 79,79 persen. Melihat perbandingan persentase antara TPAK wanita dengan laki-laki pada 50 tahun yang lalu, partisipasi wanita pada saat itu jelas terlihat jauh lebih rendah. Namun, seiring dengan berkembangnya proses pembangunan serta modernisasi, partisipasi angkatan kerja wanita pada masa sekarang menunjukkan peningkatan hampir mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 1961. Tahun 2016, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita mencapai angka 50,77 persen, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki hanya naik sedikit menjadi 81,97 persen.

Berdasarkan Gambar 1.2, dapat dilihat perbandingan antara tingkat partisipasi angkatan kerja wanita dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki di Indonesia dari tahun 1961 hingga 2016. Mulanya tingkat partisipasi angkatan kerja wanita berada pada posisi jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki. Namun pada tahun-tahun berikutnya partisipasi angkatan kerja wanita mengalami peningkatan dengan pertumbuhan mencapai 11,24 persen pada periode 1961-1980 dan 30,18 persen pada periode 1990-2016. Kesenjangan antara tingkat partisipasi angkatan kerja wanita dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mulai mengalami penurunan yang jelas sejak tahun 1990.



Gambar 1.2 Perbandingan TPAK wanita dengan TPAK laki-laki di Indonesia, 1961-2016 (Sumber: BPS, data diolah)

Tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah penduduk dalam usia kerja, jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, struktur umur, tingkat penghasilan keluarga relatif terhadap kebutuhan, tingkat upah, tingkat pendidikan, serta kegiatan ekonomi pada umumnya (Simanjuntak, 2005).

Dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) salah satunya yaitu tingkat upah, biasanya disebut

dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja (Simanjuntak, 2005).

Di Indonesia, pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Dalam Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, upah minimum didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap (Sulistiawati, 2012). Penetapannya merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja, diarahkan agar penentuan besarnya mengacu kepada terpenuhinya kebutuhan hidup minimum (KHM). Ini sesuai dengan standar internasional bahwa upah minimum yang ditetapkan harus mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum (BPS, 2008). Berdasarkan hal tersebut tingkat upah tidak terlepas dari penelitian ini yang mana tingkat upah juga dapat mempengaruhi orang untuk masuk atau tidak ke pasar tenaga kerja, dimana jika tingkat upah tinggi maka makin banyak masyarakat akan masuk kedalam pasar tenaga kerja, otomatis diharapkan juga dapat meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia.

Perkembangan tingkat upah minimum rata-rata nasional pada Tabel 1.1 menunjukkan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 upah minimum mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai tahun 2014 hingga mencapai 22,17% pada tahun 2014 dan menjadikan jumlah tersebut sebagai pertumbuhan upah tertinggi. Tahun selanjutnya, upah minimum terus mengalami penurunan yaitu sebesar 13% pada tahun 2015 dan 5,89% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena pemangkasan subsidi BBM membuat biaya produksi dan distribusi barang melonjak padahal daya beli masyarakat menurun sehingga keuntungan perusahaan juga menurun.

Tabel 1.1 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2016

Tahun	Upah Minimum Provinsi di Indonesia (rupiah/bulan)	Pertumbuhan (%)
2012	1.088.903	10,12
2013	1.296.908	19,10
2014	1.584.391	22,17
2015	1.790.342	13
2016	1.895.745	5,89

Sumber : BPS dan kabarburuh.com (data diolah)

Menurut Simanjuntak (2005), program pembangunan, disatu pihak menuntut keterlibatan banyak orang dan dilain pihak dapat menumbuhkan harapan-harapan yang baru. Harapan untuk dapat ikut menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan dalam peningkatan partisipasi kerja. Jadi semakin bertambah adanya kegiatan ekonomi yang salah satunya adalah investasi, maka tingkat partisipasi angkatan kerja akan semakin besar.

Tabel 1.2 Perkembangan Investasi di Indonesia Tahun 2012-2016

Tahun	Investasi Swasta		Investasi Pemerintah (Rp)
	PMA (juta US\$)	PMDN (miliar Rp)	
2012	24.564,70	92.182	29.969.889.370
2013	28.617,50	128.150	36.569.394.215
2014	28.529,70	156.126	36.839.397.037
2015	29.276	179.446	45.158.055.320
2016	7.502,8	58.107,6	56.896.339.154

Sumber: BPS dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia 2016 (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 1.2, besarnya investasi pemerintah meningkat setiap tahun, sedangkan besarnya investasi swasta yang berasal dari PMDN mengalami penurunan pada tahun 2016 dan investasi swasta yang berasal dari PMA mengalami penurunan tahun 2014 dan 2016.

Jumlah penduduk wanita yang bekerja meningkat menandakan bahwa kesempatan kerja meningkat. Melihat hal itu, wanita yang bersekolah atau

mengurus rumah tangga tertarik untuk masuk ke pasar tenaga kerja dan mengakibatkan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita meningkat.

Tabel 1.3 Perkembangan Penduduk Wanita yang Bekerja di Indonesia Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Wanita yang Bekerja	Pertumbuhan
2012	42531177	-
2013	42701361	0,4%
2014	44397230	4%
2015	43711307	-1,5%
2016	46123977	5,5%

Sumber: BPS (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 1.3, besarnya jumlah penduduk wanita yang bekerja meningkat dari tahun 2012-2014, menurun pada 2015, dan meningkat pada tahun 2016. Peningkatan ini menyebabkan jumlah angkatan kerja meningkat dan menyebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja ikut meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ditentukan rumusan masalah, yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita di Indonesia tahun 2012-2016?
2. Seberapa besar pengaruh Investasi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita di Indonesia tahun 2012-2016?
3. Seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk Wanita yang Bekerja terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita di Indonesia tahun 2012-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita di Indonesia tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Investasi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita di Indonesia tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penduduk Wanita yang Bekerja terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita di Indonesia tahun 2012-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Penelitian dilakukan dengan harapan hasil yang diperoleh dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat atau komunitas publik secara keseluruhan atau *stakeholder* secara khusus.
3. Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah atau pembuat kebijakan dalam meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita untuk kepentingan pembangunan ekonomi dikarenakan setiap tahun laju pertumbuhan penduduk wanita lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk laki-laki.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi Malthus

Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malahan proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten di pihak rakyat. Dia tidak memberikan gambaran adanya gerakan menuju keadaan stasioner tetapi menekankan bahwa perekonomian mengalami kemerosotan beberapa kali sebelum tercapainya tingkat tertinggi dari pembangunan. Jadi menurut Malthus proses pembangunan adalah suatu proses naik-turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekadar lancar-tidaknya aktivitas ekonomi.

Malthus menitikberatkan perhatian pada “perkembangan kesejahteraan” suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas penduduk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut. Malthus berpendapat “pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding”. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Kondisi demikian mendorong pertumbuhan penduduk. Akan tetapi pertumbuhan penduduk saja tidak meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif (*effective demand*). Peningkatan pada permintaan efektif akan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan.

Malthus mendefinisikan problem pembangunan ekonomi sebagai sesuatu yang menjelaskan perbedaan antara *Gross National Product Potential* (“Kemampuan menghasilkan kekayaan”) dan *Gross National Product actual* (“kekayaan aktual”). Tetapi problem pokoknya adalah bagaimana mencapai tingkat *Gross National Product* potensial yang tinggi. Menurut Malthus, besarnya *Gross National Product* potensial tergantung pada tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Bila keempat faktor ini dipakai dalam proporsi yang benar, maka ia

akan memaksimalkan produksi. Selain itu, Malthus juga menekankan pentingnya faktor nonekonomi dalam pembangunan ekonomi “yang termasuk dalam politik dan moral”. Faktor tersebut adalah keamanan atas kekayaan, konstitusi dan hukum yang baik dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; kerja keras dan kebiasaan teratur, serta sifat jujur pada umumnya. (Jhingan, 2014: 97-98).

2.1.2 Konsep Tenaga Kerja

Sumberdaya manusia atau human resources mengandung dua pengertian. Pertama, sumberdaya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua dari SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenagakerja atau manpower. Secara singkat, tenagakerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (*working-age population*).

Pendayagunaan SDM untuk menghasilkan barang dan jasa dipengaruhi oleh dua kelompok faktor yaitu, pertama, yang mempengaruhi pengembangan perekonomian yang kemudian mempengaruhi pendayagunaan SDM tersebut. Dengan kata lain, sebagaimana halnya dalam ilmu ekonomi pada umumnya, maka Ekonomi Sumberdaya Manusia membicarakan: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan tenagakerja, dan (3) pasar kerja dimana terjadi proses mempertemukan lowongan kerja dan pencari kerja. Disamping itu, Ekonomi Sumberdaya Manusia atau Ekonomi Tenagakerja juga membahas: (4) masalah-masalah yang timbul dalam aspek-aspek (1), (2), dan (3) tersebut diatas, dan (5)

alternatif-alternatif kebijakan yang perlu diambil untuk memecahkan masalah-masalah tersebut (Simanjuntak, 2005).

Di Indonesia, pengertian tenagakerja atau manpower mulai sering digunakan. Tenagakerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja (Simanjuntak, 2005).

Secara praktis, pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Tiap-tiap negara memberikan batasan umur yang berbeda. India misalnya menggunakan batasan umur 14-60 tahun. Jadi tenagakerja adalah penduduk yang berumur antara 14 sampai 60 tahun sedangkan orang yang berumur dibawah 14 tahun atau diatas 60 tahun digolongkan sebagai bukan tenagakerja. Amerika Serikat mula-mula menggunakan batas umur minimum 14 tahun tanpa batas umur maksimum. Kemudian sejak tahun 1967 batas umur dinaikkan menjadi 16 tahun. Jadi di Amerika Serikat, yang dinamakan tenagakerja adalah penduduk yang berumur 16 tahun atau lebih, sedang mereka yang berumur dibawah 16 tahun tergolong bukan tenagakerja. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut adalah supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Tiap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi tenagakerja di masing-masing negara juga berbeda (Simanjuntak, 2005).

Di Indonesia, semula dipilih batas umur minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Dengan demikian tenagakerja di Indonesia dimaksudkan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih. Pemilihan 10 tahun sebagai batas umur minimum adalah berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk berumur muda terutama di desa-desa sudah bekerja atau mencaari pekerjaan. Misalnya dalam tahun 1971, diantara penduduk kota dalam batas umur 10-14 tahun terdapat 7,1 persen yang tergolong bekerja atau mencaari pekerjaan, sedang diantar penduduk desa terdapat 18 persen. Dengan kata lain, sekitar 16 persen penduduk kota dan desa dalam kelompok umur 10-14 tahun

ternyata telah bekerja atau mencari pekerjaan. kata lain, sekitar 16 persen penduduk kota dan desa dalam kelompok umur 10-14 tahun ternyata telah bekerja atau mencari pekerjaan. kata lain, sekitar 16 persen penduduk kota dan desa dalam kelompok umur 10-14 tahun ternyata telah bekerja atau mencari pekerjaan (Simanjuntak, 2005).

Dengan bertambahnya kegiatan pendidikan maka jumlah penduduk dalam usia sekolah yang melakukan kegiatan ekonomi akan berkurang. Bila wajib sekolah 9 tahun ditetapkan, maka anak-anak sampai dengan umur 14 tahun akan berada di sekolah. Dengan kata lain jumlah penduduk yang bekerja dalam batas umur tersebut akan menjadi sangat kecil, sehingga batas umur minimum lebih tepat dinaikkan menjadi 15 tahun. Atas pertimbangan tersebut, Undang-undang No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan telah menetapkan batas usia kerja mencapai 15 tahun. Dengan kata lain, sesuai dengan mulai berlakunya Undang-undang ini, mulai tanggal 1 Oktober 1998 tenagakerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun atau lebih (Simanjuntak, 2005).

Demikian juga Indonesia tidak menganut batas umur maksimum. Alasannya adalah bahwa Indonesia belum mempunyai jaminan social nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan di hari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil perusahaan swasta. Buat golongan ini pun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu mereka yang telah mencapai usia pension biasanya tetap masih harus bekerja. Dengan kata lain sebagian besar penduduk dalam usia pension masih aktif dalam kegiatan ekonomi dan oleh sebab itu mereka tetap digolongkan sebagai tenagakerja (Simanjuntak 2005).

Tenagakerja atau manpower terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja . angkatan kerja atau labor force terdiri dari (1) golongan yang bekerja, dan (2) golongan yang menganggur ndan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bersekolah, (2) golongan yang mengurus rumah tangga, dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok angkatan kerja sewaktu-waktu dapat

menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai *potential labor force* (Simanjuntak, 2005).

Besarnya penyediaan atau supply tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Diantara mereka sebagian sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang atau jasa. Mereka dinamakan golongan yang bekerja atau *employed persons*. Sebagian lain tergolong yang siap bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Mereka dinamakan pencari kerja atau penganggur. Jumlah yang bekerja dan pencari kerja dinamakan angkatan kerja atau *labor force*.

ILO menjelaskan bahwa terdapat beberapa konsep angkatan kerja. Pertama, pendekatan *Gainful worker* beranggapan bahwa dalam perekonomian suatu negara tingkat keberhasilan yang dicapai dapat diukur melalui luasnya kesempatan kerja yang dapat diciptakan atau dihitung dari jumlah orang yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Kedua, pendekatan *labor force* yang dilaksanakan dengan jalan mengamati penduduk yang tergolong aktif secara ekonomis. Menurut pengertian ini penduduk yang aktif adalah mereka yang sudah memperoleh pekerjaan dan yang sedang mencari pekerjaan. Dengan demikian, pendekatan *labor force* membedakan antara mereka yang termasuk angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Selain itu yang termasuk angkatan kerja dalam konsep ini adalah orang yang berkerja dan yang mencari pekerjaan. Dengan demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan dengan jumlah penduduk pada usia kerja. Ketiga, penggunaan tenaga kerja tidak penuh dan pendekatan normative merupakan salah satu konsep angkatan kerja juga. Seperti pendekatan *labor force*, maka metode untuk perhitungan persediaan tenaga kerja dan penggunaan tenaga kerja tidak penuh, juga didekati dengan berbagai macam cara. Penekanan pendapatan normative adalah pada pengukuran tingkat penggunaan tenaga kerja tidak penuh pada proses produksi/kerja. Pada pendekatan ini seluruh penduduk dibagi atas yang telah bekerja, mencari pekerjaan dan yang secara ekonomi tidak aktif sama sekali. Dalam pendekatan ini juga dibedakan antara yang bekerja dan tidak bekerja. Keempat, pendekatan efisiensi tenaga kerja (*The*

Labor Efficiency Approach) dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Menurut Myrdal, dalam pendekatan angkatan kerja masih belum memperhatikan efisiensi penggunaan tenaga kerja dengan demikian tidak dapat digunakan untuk mengukur penggunaan tenaga kerja tidak penuh. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Myrdal mengemukakan bahwa tingkat penggunaan tenaga kerja dapat diukur melalui 3 komponen berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pekerja}}{\text{Angkatan Kerja}} \times \frac{\text{Jam Kerja Orang}}{\text{Jumlah Pekerja}} \times \frac{\text{Output}}{\text{Jam Kerja Orang}} = \frac{\text{Output}}{\text{Angkatan Kerja}}$$

Dengan demikian, indek daripada penggunaan tenaga kerja merupakan gabungan dari komponen-komponen tersebut diatas. Kelima, pendekatan Philip Hauser dilaksanakan menggunakan dasar pendekatan angkatan kerja (*labor force approach*) dengan menambah variabel pendidikan/latihan dan pendapatan. Dengan demikian pendekatan ini didasarkan pada dua faktor; pertama, penggunaan potensi kerja yang dimiliki seseorang dalam hal cukup digunakan (*in adequately utilized*). Untuk praktisnya yang terakhir ini diukur dengan tingkat pendidikan. Faktor kedua adalah pendapatan. Secara skematis pendekatan ini dapat dituliskan sebagai berikut:

Penduduk yang mempunyai kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi:

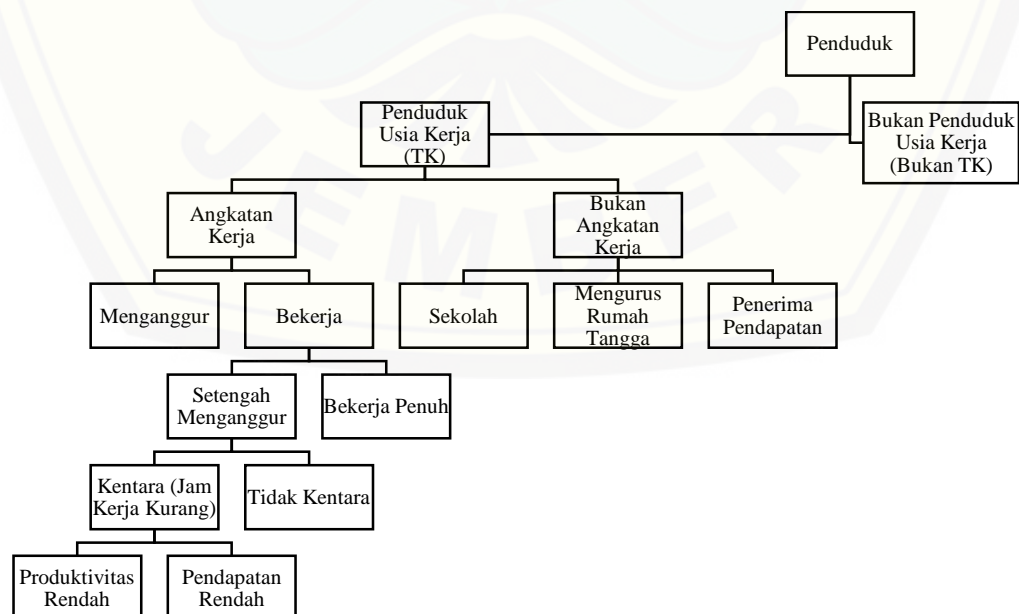
1. Tenaga kerja yang digunakan kurang cukup (*inadequately utilized*) terdiri atas: penganggur, jam kerja yang kurang, pendapatan rendah, tingkat pendidikan yang disyaratkan pekerjaan lebih rendah dari tingkat pendidikan yang dimiliki
2. Tenaga kerja yang digunakan penuh (*adequately utilized*) (Swasono dkk, 1987).

Pada dasarnya mereka yang termasuk kelompok bukan angkatan kerja ini (kecuali yang terakhir yaitu mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain) sewaktu-waktu dapat terjun ke pasar kerja untuk ikut bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini kelompok ini dapat juga disebutkan sebagai angkatan kerja potensial (*potential labor force*). Termasuk dalam kelompok angkatan kerja potensial ini mereka yang menarik diri dari pasar kerja. Misalnya, setelah cukup lama tidak berhasil memperoleh pekerjaan yang yang diharapkan, seseorang dapat

mengurungkan niatnya mencari pekerjaan yang dimaksud. Mereka sebenarnya masih ingin bekerja, akan tetapi tidak aktif mencari pekerjaan. Mereka disebut *discouraged workers*, yang sementara keluar dari pasar kerja, karena tidak berhasil memperoleh pekerjaan yang diharapkan (Swasono dkk, 1987).

Bila kondisi pekerjaan cukup menarik atau bila keluarga tidak mampu membiayai sekolah, maka tenagakerja yang tergolong bersekolah akan meninggalkan sekolahnya untuk sementara dan mencari pekerjaan. Sebaliknya orang tersebut akan kembali lagi ke bangku sekolah bila kondisi pekerjaan berubah menjadi kurang menarik dan/atau keluarga sudah mampu. Demikian juga tenagakerja yang mengurus rumah tangga akan masuk pasar kerja bila tingkat upah dan/atau bila penghasilan keluarga rendah relatif terhadap kebutuhannya. Mereka akan kembali mengurus rumah tangga bila keadaan sebaliknya terjadi. Golongan penduduk yang seperti itu dinamakan juga angkatan kerja sekunder, dibedakan terhadap angkatan kerja primer yaitu mereka yang secara terus-menerus berada dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) (Simanjuntak, 2005).

Untuk memperjelas mengenai komposisi penduduk dan tenaga kerja, maka dibuat skema pada gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Komposisi Penduduk dan Tenagakerja (Sumber: Simanjuntak, 2005)

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung pada 1) jumlah penduduk, 2) persentase jumlah penduduk yang memilih masuk dalam angkatan kerja, dan 3) jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Lebih lanjut masing-masing dari ketiga komponen ini dari jumlah tenaga kerja keseluruhan yang ditawarkan tergantung pada upah pasar (Arfida, 2003).

Simanjuntak (2005) menyatakan bahwa penawaran tenaga kerja mengandung pengertian jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan. Secara umum penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, tenaga kerja, upah, jam kerja, pendidikan, produktifitas, dan lain-lain.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif dipasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa (BPS, 2012).

Menurut Mulyadi (2003), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut. Dapat dirumuskan:

$$TPAK = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan. Bila angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja kecil maka diduga penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan sebagainya.

2.1.3 Definisi dan Peraturan Upah Minimum Provinsi

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, upah minimum adalah upah bulanan

terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Apabila kita merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Definisi tunjangan tetap disini adalah tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja contohnya: tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi. Beda halnya dengan tunjangan makan dan transportasi, tunjangan itu bersifat tidak tetap karena perhitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja.

Upah minimum terdiri dari:

1. Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Upah minimum ini ditetapkan setiap satu tahun sekali oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi). Penetapan upah selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu tanggal 1 Januari.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota. Upah minimum kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum provinsi. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu 1 Januari.
3. Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) yaitu upah minimum yang berlaku secara sektorial di satu provinsi. Upah minimum sektorial provinsi merupakan hasil perundingan dan kesepakatan antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh. Usulan upah minimum sektorial (hasil kesepakatan) tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor wilayah Kementrian Tenaga Kerja untuk ditetapkan sebagai upah minimum sektorial provinsi.

4. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota. Upah minimum sektoral kabupaten/kota merupakan hasil perundingan dan kesepakatan antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh. Usulan upah minimum sektoral (hasil kesepakatan) tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor wilayah Kementerian Tenaga Kerja untuk ditetapkan sebagai upah minimum sektoral kabupaten/kota.

Menurut Sholeh (2007), kebijakan upah minimum adalah sebuah kontroversi, bagi yang mendukung kebijakan tersebut mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan “*living wage*”, yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang memiliki kemampuan yang kurang mumpuni. Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional. Di Indonesia, pemerintah ikut serta dalam mengatur hal penetapan tingkat upah. Pemerintah menetapkan tingkat upah minimum yang harus dibayar oleh perusahaan. Besarnya upah minimum untuk setiap daerah berbeda-beda dikarenakan faktor-faktor berikut (Djoko *et al*, 2015):

1. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)
2. Indeks Harga Konsumen (IHK)
3. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan
4. Kondisi pasar kerja
5. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 43 menyebutkan bahwa penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kehidupan hidup layak tersebut merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan hidup 1 bulan. Kebutuhan hidup layak

terdiri atas beberapa komponen dan komponen tersebut terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup. Komponen tersebut ditinjau oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional dalam jangka 5 tahun dengan menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 menetapkan formula perhitungan upah minimum, yaitu:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (Inflasi_t + \% \Delta PDB_t)\}$$

Keterangan:

UM_n = Upah minimum yang akan ditetapkan

UM_t = Upah minimum tahun berjalan

Inflasi t = Inflasi yang dihitung dari September tahun lalu sampai September tahun berjalan

Δ PDB = Pertumbuhan PDB yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang mencakup kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan

2.1.4 Definisi Investasi, Jenis Investasi, dan Fungsi Investasi

Menurut Sukirno (2006), investasi sebagai pengeluaran atau penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Sumber dalam objek investasi menurut Mankiw (2003), barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan yang memiliki nilai yang lebih besar. Investasi memiliki 3 subkelompok: investasi tetap bisnis, investasi tetap residensial, dan investasi persediaan. Investasi tetap bisnis adalah pembelian pabrik dan peralatan baru oleh perusahaan. Investasi residensi adalah pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah. Investasi persediaan adalah peningkatan dalam persediaan barang perusahaan (jika persediaan menurun, investasi persediaan negatif).

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah. Investasi pemerintah berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBN atau APBD. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsipun bertambah dan bertambah pula *effective demand*. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut *induced investment*.

Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri. Masuknya PMA di Indonesia diatur oleh pemerintah dalam UU No 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan dilengkapi serta disempurnakan oleh UU No 11 Tahun 1970 juga tentang penanaman modal asing. UU itu didukung oleh berbagai kemudahan yang dilengkapi dengan berbagai kebijakan dalam paket-paket deregulasi. Kebijakan tentang rencana PMDN ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No 6 Tahun 1968, kemudian disempurnakan dengan diberlakukannya UU No. 12 Tahun 1970.

Investasi merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang-barang modal yang terdiri dari mesin-mesin, pabrik, kantor dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Menurut Rosyidi (2006), secara keseluruhan yang mempengaruhi volume investasi ada dua yaitu suku bunga dan *marginal efficiency of capital* (MEC). MEC menyatakan besarnya keuntungan yang akan diperoleh dengan ditanamnya modal, sedangkan suku bunga adalah tingkat harga dari uang, yaitu berapa persenkah dari sejumlah uang tertentu, yang harus dikembalikan atau dibayarkan karena dipakainya uang itu. Kedua kekuatan itu yakni MEC dan suku

bunga merupakan dua kekuatan yang senantiasa tarik-menarik serta saling berpengaruh dalam menentukan volume investasi.

Menurut Boediono (1992), di dalam teori makro Keynes keputusan apakah suatu Investasi akan di laksanakan atau tidak, tergantung pada perbandingan antara besarnya keuntungan yang di harapkan (yang menyatakan dalam persentase satuan waktu) di suatu pihak dan biaya penggunaan dana atau tingkat bunga di pihak lain. Apabila tingkat bunga yang berlaku di pasar uang sebesar 2% setiap bulan (atau 24% setahun), sedangkan keuntungan yang di harapkan sebesar 50% maka investasi tersebut masih menguntungkan karena keuntungan (kotor) yang di harapkan 50% jadi melebihi ongkos pendanaan dapat di katakan $50\% - 24\% = 26\%$ pertahun untuk 10 tahun. Maka jika pengusaha tersebut “rasional” investasi tersebut akan dilaksanakan. Secara ringkas dalam teori Keynes, tingkat keuntungan yang diharapkan ini disebut dengan istilah *Marginal Efficiency of Capital*.

1. Jika keuntungan yang diharapkan (MEC) lebih besar dari pada tingkat bunga maka investasi di laksanakan.
2. Jika MEC lebih kecil dari pada tingkat bunga maka investasi tidak dilaksanakan.
3. Jika MEC = tingkat bunga maka investasi bisa di laksanakan dan bisa juga tidak.

Dari uraian di atas, di ketahui bahwa berapa besar tingkat pengeluaran investasi yang di harapkan oleh para investasi di tentukan oleh dua hal yaitu tingkat suku bunga yang berlaku dan *marginal efficiency of capital*. Perilaku makro para investor ini biasanya dapat di ringkas dalam satu bentuk *fungsi marginal efficiency of capital* atau *fungsi investasi*.

Tiga hal yang perlu di garis bawahi mengenai fungsi investasi, pertama fungsi tersebut mempunyai slope yang negatif, artinya semakin rendah tingkat bunga semakin besar pula tingkat pengeluaran investasi yang di inginkan. Kedua, dalam kenyataan fungsi tersebut sulit untuk di peroleh sebab posisinya sangat labil (mudah berubah dalam jangka waktu yang sangat singkat). Kelabilan fungsi investasi ini akan segera dapat di pahami karena posisinya sangat tergantung pada

nilai MEC dari proyek-proyek yang ada, dan bahwa MEC adalah keuntungan yang di harapkan oleh investor. Ketiga, yang perlu ditekankan adalah hubungan teori Keynes dengan kenyataan, khususnya masalah tersedianya dana investasi (Boediono, 1992).

2.1.5 Penduduk Wanita yang Bekerja dan Penawaran Tenaga Kerja

Menurut BPS, penduduk wanita yang bekerja adalah penduduk wanita yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Untuk suatu perekonomian, maka konsep penawaran tenaga kerja memiliki banyak dimensi. Tenaga kerja agregat yang tersedia di masyarakat bergantung pada (1) populasi, (2) komposisi demografi penduduk dan (3) tingkat partisipasi angkatan kerja (McConnel, 2003: 51). Populasi penduduk dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian dan migrasi penduduk neto. Di Indonesia, angka kematian terus menunjukkan penurunan seiring dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama membaiknya sarana dan prasarana kesehatan. Sementara itu jumlah migrasi neto penduduk juga tidak begitu besar, sehingga ketersediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh angka kelahiran. Dengan jumlah penduduk sangat besar, maka jumlah angkatan kerja yang tersedia melebihi jumlah tenaga kerja diminta. Hal ini berarti terjadi kelebihan pencari kerja di atas jumlah pekerja diminta (*labor surplus*). Adanya *labor surplus* menyebabkan angka pengangguran tinggi dan disertai dengan tingkat upah yang rendah.

Faktor kedua yang berpengaruh pada penawaran tenaga kerja adalah komposisi demografi penduduk di antaranya jumlah penduduk pada berbagai usia. Ditinjau dari usia, maka penduduk suatu negara (perekonomian) terdiri dari penduduk pada usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Mereka yang termasuk di luar usia kerja adalah anak-anak dan penduduk berusia lanjut (pasca kerja). Selanjutnya, kelompok penduduk yang berada pada usia kerja disebut tenaga

kerja. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari kerja (menganggur). Sementara itu kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah dan atau golongan penerima pendapatan. Dalam suatu perekonomian, penawaran tenaga kerja ditentukan oleh jumlah angkatan kerja. Semakin besar jumlah angkatan kerja, semakin besar pula penawaran tenaga kerja.

Selanjutnya faktor lain yang berpengaruh pada penawaran tenaga kerja adalah partisipasi angkatan kerja. Pengaruh partisipasi angkatan kerja dijelaskan melalui model alokasi waktu yang dikemukakan oleh Becker (McConnell *et al.*, 2003). Model ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari model pilihan antara bekerja dan leisure. Rumah tangga sebagai unit ekonomi diasumsikan memaksimalkan utilitas. Utilitas rumah tangga dihasilkan oleh kombinasi barang dan jasa yang dikonsumsi, dan waktu yang tersedia bagi rumah tangga tersebut. Rumah tangga dapat menggunakan waktu yang tersedia untuk 3 (tiga) macam kegiatan meliputi

1. Penggunaan waktu untuk bekerja di pasar tenaga kerja
2. Penggunaan waktu untuk kegiatan di rumah tangga (*household production*)
3. Penggunaan waktu untuk mengkonsumsi barang dan jasa

Pengembangan model pilihan bekerja-*leisure* dilakukan melalui penentuan alokasi waktu untuk berbagai tujuan. Maksimasi utilitas suatu rumah tangga bergantung cara anggota rumah tangga tersebut dalam mengalokasikan waktunya di antara berbagai pilihan yang meliputi bekerja di pasar tenaga kerja, kegiatan rumah tangga dan konsumsi. Prinsip umum yang digunakan dalam penentuan alokasi waktu adalah faktor keunggulan komparatif (Bosworth *et al.*, 1996).

Seorang individu akan melakukan spesialisasi pada kegiatan yang paling efisien atau memiliki biaya oportunitas terendah. Misal terjadi kenaikan upah. Berdasar efek pendapatan, maka kenaikan upah akan menyebabkan kenaikan income suatu rumah tangga sehingga konsumsi mereka juga mengalami kenaikan. Kegiatan konsumsi ini memerlukan waktu. Hal ini berarti efek pendapatan akan

menurunkan jam kerja. Sementara itu, berdasar efek substitusi kenaikan upah menyebabkan waktu yang tersedia akan lebih berharga bila digunakan untuk bekerja. Rumah tangga tersebut akan melakukan substitusi dengan lebih banyak menggunakan waktu yang tersedia untuk bekerja. Dengan demikian efek substitusi meningkatkan jam kerja. Dampak kenaikan upah terhadap jam kerja bergantung pada efek neto dari efek pendapatan dan efek substitusi (McConnel *et al.*, 2003). Apabila efek substitusi lebih dominan daripada efek pendapatan maka jam kerja suatu rumah tangga meningkat sehingga partisipasi angkatan kerja naik.

Partisipasi angkatan kerja akan berkurang apabila terdapat pendapatan di luar bekerja (*non-labor income*) seperti pensiun, tunjangan untuk penganggur dan pendapatan dari akumulasi kekayaan. Selanjutnya, partisipasi angkatan kerja akan naik apabila terjadi perubahan preferensi rumah tangga (bekerja menjadi lebih disukai daripada yang lain) dan peningkatan produktivitas dalam rumah tangga sehingga tersedia lebih banyak waktu untuk kegiatan bekerja di pasar tenaga kerja.

Partisipasi tenaga kerja juga bergantung pada kondisi perekonomian. Pada saat perekonomian mengalami resesi maka sebagian pekerja terpaksa kehilangan pekerjaannya. Selama masa resesi, pekerja yang menganggur menjadi pesimis untuk mendapatkan pekerjaan pada tingkat upah tertentu sehingga mereka menjadi non-partisipan (tidak mencari kerja). Sebaliknya pada saat perekonomian membaik (*booming*), maka sejumlah pekerja yang selama ini menjadi non-partisipan (tidak bekerja maupun mencari kerja) menjadi optimis. Mereka akan berupaya untuk mencari kerja. Dengan demikian pada saat perekonomian membaik, maka jumlah penawaran tenaga kerja mengalami kenaikan.

2.1.6 Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita

Teori upah efisiensi (*efficiency-wage*) menyatakan upah yang tinggi membuat pekerja lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah akan menurunkan tagihan upah perusahaan, itu juga akan menurunkan produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Teori upah-efisiensi yang pertama menyatakan

bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Pengaruh upah terhadap efisiensi pekerja dapat menjelaskan kegagalan perusahaan untuk memangkas upah meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. Meskipun akan mengurangi tagihan upah perusahaan, maka pengurangan upah akan memperendah produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Teori upah-efisiensi yang kedua, menyatakan bahwa upah yang tinggi menurunkan perputaran tenaga kerja. Dengan membayar upah yang tinggi, perusahaan mengurangi frekuensi pekerja yang keluar dari pekerjaan, sekaligus mengurangi waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menarik dan melatih pekerja baru. Teori upah-efisiensi yang ketiga menyatakan bahwa kualitas rata-rata tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang dibayar kepada karyawannya. Jika perusahaan mengurangi upahnya, maka pekerja terbaik bisa mengambil pekerjaan di tempat lain, meninggalkan perusahaan dengan pekerja yang tidak terdidik yang memiliki lebih sedikit alternatif. Dan teori upah-efisiensi yang keempat menyatakan bahwa upah yang tinggi meningkatkan upaya pekerja. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat memantau dengan sempurna upaya para pekerja, dan para pekerja harus memutuskan sendiri sejauh mana mereka akan bekerja keras. Semakin tinggi upah, semakin besar kerugian bagi pekerja bila mereka sampai dipecat. Dengan membayar upah yang lebih tinggi, perusahaan memotivasi lebih banyak pekerja agar tidak bermalas-malasan dan dengan demikian meningkatkan produktivitas mereka. Meskipun keempat teori upah-efisiensi ini secara rinci berbeda, namun teori-teori tersebut menyuarakan topik yang sama: karena perusahaan beroperasi lebih efisien jika membayar pekerjanya dengan upah yang tinggi, maka perusahaan dapat menganggap bahwa mempertahankan upah di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan adalah menguntungkan. (Mankiw, 2006)

Pandangan yang lainnya (bersebrangan) dengan teori neoklasik yakni *efficiency wage theory* (teori upah efisiensi). Teori upah efisiensi ini berfokus pada upah sebagai tujuan yang memotivasi buruh. Jumlah usaha yang dibuat buruh dalam pekerjaannya adalah berhubungan terhadap seberapa baik pekerjaan itu membayar relatif terhadap alternatif pekerjaan lainnya. Perusahaan akan

bersedia membayar upah diatas upah keseimbangan pasar untuk memastikan bahwa buruh bekerja keras agar tidak kehilangan pekerjaannya yang baik itu. Teori upah efisiensi ini juga menyebutkan dengan penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan upah juga memungkinkan buruh untuk menyekolahkan anaknya dan memberi nutrisi yang lebih baik bagi anak-anaknya. Keduanya dalam jangka panjang akan memberi dampak yang besar terhadap peningkatan produktivitas. Upah yang dibayarkan menurut teori ini jauh diatas upah keseimbangan, hal tersebut selain akan meningkatkan produktivitas juga akan menimbulkan loyalitas pekerja, membuat lebih banyak pekerja yang berkualitas.

Menurut teori upah efisiensi (*efficiency wage theory*) bahwa penetapan upah minimum yang tinggi dapat mendorong produktivitas pekerja dalam jangka panjang. Produktivitas pekerja selanjutnya akan meningkatkan keuntungan perusahaan dalam melakukan proses produksi sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan akan semakin meningkat. Teori upah efisiensi ini berfokus pada upah sebagai tujuan dalam mendorong tenaga kerja untuk memaksimalkan produktivitasnya dalam bekerja sehingga kesejahteraan tenaga kerja akan semakin terjamin. Perusahaan akan bersedia membayar upah diatas upah keseimbangan pasar untuk memastikan bahwa tenaga kerja bekerja keras agar tidak kehilangan pekerjaannya yang baik itu. Upah yang dibayarkan menurut teori ini jauh diatas upah keseimbangan, hal tersebut selain akan meningkatkan produktivitas juga akan menimbulkan loyalitas pekerja, membuat lebih banyak pekerja yang berkualitas. (Sumarsono dalam Devy L, 2009).

2.1.7 Pengaruh Investasi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita

Menurut Simanjuntak (2005), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang masih sekolah

Semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, semakin kecil jumlah angkatan kerja dan semakin kecil Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

2. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga

Semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah tangga maka semakin kecil Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

3. Tingkat penghasilan keluarga

Keluarga berpenghasilan besar cenderung memperkecil jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja relatif rendah.

4. Struktur umur

Penduduk berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab yang begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga.

5. Tingkat upah

Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin tinggi anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja atau tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat.

6. Tingkat pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja. Terutama bagi para perempuan dengan semakin tinggi pendidikan, kecenderungan untuk bekerja semakin meningkat.

7. Kegiatan ekonomi

Program pembangunan disatu pihak menuntut keterlibatan lebih banyak orang dan dilain pihak program pembangunan menumbuhkan harapan-harapan baru. Harapan untuk dapat menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan dalam peningkatan partisipasi kerja. Jadi, semakin bertambah kegiatan ekonomi semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerja.

2.1.8 Pengaruh Jumlah Penduduk Wanita yang Bekerja terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita

Ananta (2000) mengemukakan bahwa tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja wanita dalam kegiatan ekonomi disebabkan oleh beberapa hal:

1. Adanya perubahan pandangan dan sikap dalam masyarakat tentang sama pentingnya pendidikan bagi kaum pria dan wanita dan semakin disadari perlunya kaum wanita ikut berpartisipasi dalam pembangunan, maka semakin tingginya pendidikan wanita akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita.
2. Adanya kemauan wanita untuk mandiri dalam bidang ekonomi yaitu berusaha membiayai kebutuhan hidupnya (dan juga kebutuhan hidup orang-orang yang menjadi tanggungannya) dengan penghasilannya sendiri, maka semakin tinggi kemauan wanita untuk mandiri akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita.
3. Adanya kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga, maka semakin tinggi kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita.
4. Makin luasnya kesempatan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja wanita, misalnya tumbuhnya industri kerajinan tangan dan industri ringan lainnya, maka semakin tinggi kesempatan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja wanita berarti semakin banyak wanita yang bekerja sehingga akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita.

2.2 Penelitian Terdahulu

Wisna Sarsi, Tri Sukirno Putro, dan Lapeti Sari (2014), dengan judul “Pengaruh tingkat upah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Riau”. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah tingkat upah dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Provinsi Riau. Jenis data yang digunakan berupa tahunan (time series) yaitu tahun 2003 -2012 dengan metode analisis kuantitatif yaitu metode regresi berganda. Dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa upah minimum dan PDRB mempunyai pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap Tingkat Partipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Riau. Variabel tingkat upah berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Riau, sedangkan

variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Riau. Faktor yang paling dominan mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Riau 2003-2012 adalah tingkat upah.

Niddaul Izzah (2015), dengan judul “Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Provinsi, Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Jakarta 2004 -2013”. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah kenaikan upah minimum provinsi, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Jenis data yang digunakan berupa tahunan (time series) yaitu tahun 2004-2013 dengan metode korelasi sederhana dan regresi linear sederhana serta digunakan juga metode analisis deskriptif. Dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa antara upah minimum provinsi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja mempunyai hubungan yang kuat dan positif. Maka, kenaikan upah minimum provinsi dapat menaikkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Jakarta 2004-2013.

Daru Mahendras Wara (2016), dengan judul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014”. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah PDRB, upah minimum kabupaten, dan investasi, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Jenis data yang digunakan berupa kombinasi dari tahunan (time series) yaitu tahun 2010-2014 dan kabupaten/kota (cross section) yaitu 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan metode data panel. Dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah PDRB dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur, upah minimum Kabupaten/Kota berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Timur, dan tidak ada pengaruh antara investasi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Jawa Timur.

Agustina (2017), dengan judul : “Peramalan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Jawa Barat”. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah Tingkat Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita, Jumlah Industri Besar, Menengah Dan Kecil, Upah Minimum Regional (Umr) Kabupaten/Kota, Tingkat Kemiskinan, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan. Dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa Indeks pendidikan, PDRB perkapita, jumlah industri kecil, menengah dan sedang, upah minimum regional serta tingkat kemiskinan, semuanya berpengaruh terhadap nilai TPAK perempuan kabupaten/kota di Jawa Barat sebagaimana hipotesis penelitian yang dibuat. Hanya saja untuk variabel jumlah industri kecil, menengah dan sedang berpengaruh negatif. Hasil ini berbeda dengan hipotesis penelitian yang menyebutkan bahwa jumlah industri kecil, menengah dan sedang berpengaruh positif terhadap nilai TPAK perempuan. Variabel ini dapat diganti dengan variabel yang dapat memperlihatkan seberapa besar tenaga kerja yang terserap agar sesuai hipotesis. Variabel yang memiliki kontribusi terbesar dalam mempengaruhi nilai TPAK perempuan di Jawa Barat adalah besarnya upah minimum regional pada setiap kabupaten/kota.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya sehingga menjadi suatu keunggulan dan keterbatasan dalam penelitian. Keunggulan dalam penelitian ini terletak pada pemilihan tahun yaitu dari tahun 2012-2016. Pemilihan data *cross-section* 33 provinsi bertujuan untuk mendapatkan objek penelitian yang mampu mewakili seluruh daerah di Indonesia baik daerah maju, berkembang, dan miskin agar dapat menggambarkan terjadinya proses pembangunan nasional untuk dapat digunakan sebagai informasi dapat dijadikan pertimbangan dan prioritas dalam perencanaan pembangunan wilayah-wilayah di Indonesia terutama yang berkaitan dengan angkatan kerja wanita. Penelitian ini juga lebih menjelaskan tentang kondisi riil tingkat partisipasi angkatan kerja wanita yang terjadi di Indonesia.

Keterbatasan dalam penelitian ini tidak dimasukkannya satu provinsi ke dalam model penelitian karena memiliki data sekunder yang belum cukup

memadai, yaitu provinsi yang mengalami pemekaran (Kalimantan Utara), namun data yang digunakan sudah menggunakan data setelah pemekaran provinsi yang tidak dimasukkan dalam penelitian untuk menghindari bias ukuran geografis terhadap data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mungkin mengabaikan variabel-variabel yang hanya bisa diteliti menggunakan data primer, misalnya struktur umur, pendidikan, tingkat penghasilan keluarga, dll.

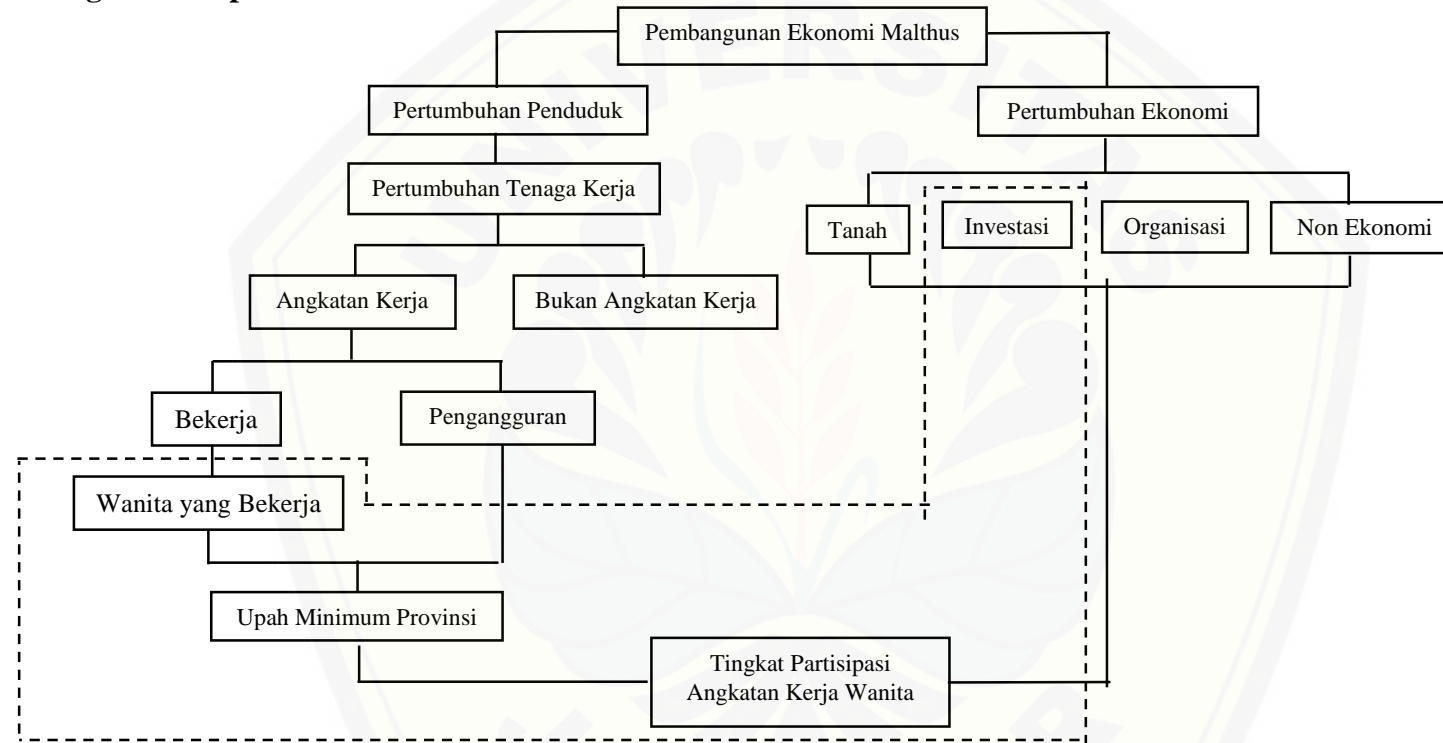


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Judul dan Tahun Penerbitan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
1.	Wisna Sarsi, Tri Sukirno Putro, Lapeti Sari (2014) Judul : “Pengaruh tingkat upah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Riau” JOM FEKON Vol. 1 No. 2, Oktober 2014	Dependen : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Riau Independen : Tingkat Upah dan Pertumbuhan Ekonomi	Metode Regresi Berganda $Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$	1) Hasil uji f menunjukkan bahwa upah minimum dan PDRB mempunyai pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Riau. 2) Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Riau. Sedangkan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Riau. Faktor yang paling dominan mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah tingkat upah.
2.	Niddaul Izzah (2015) Judul : “Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Provinsi, Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Jakarta 2004 -2013” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi ISSN 2085-1162 Volume VII, Nomor 01, Maret 2015	Dependen : Tingkat Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Independen : Upah Minimum Provinsi	Metode Korelasi Sederhana dan Regresi Linear Sederhana	1) Kenaikkan Upah minimum Provinsi dapat menurunkan tingkat pengangguran dan menaikkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Jakarta.
3.	Daru Mahendras Wara (2016) Judul : “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Vol. 4 No. 2 : Semester Genap 2015/2016, Juni 2016	Dependen : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Independen : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Dan Investasi	Metode Data Panel	1) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah PDRB dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode tahun 2010-2014. 2) Upah minimum Kabupaten/Kota berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. 3) Tidak ada pengaruh antara investasi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode tahun 2010-2014.

4. Agustina (2017)
 Judul : “Peramalan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Jawa Barat”
 Jurnal Ilmiah UMMI, Volume X1, No. 03 Desember 2017
- Dependen: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
 Independen: Tingkat Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita, Jumlah Industri Besar, Menengah Dan Kecil, Upah Minimum Regional (Umr) Kabupaten/Kota, Tingkat Kemiskinan.
- Model Autoregresif Spasial
- Panel
- Indeks pendidikan, PDRB perkapita, jumlah industri kecil, menengah dan sedang, upah minimum regional serta tingkat kemiskinan, semuanya berpengaruh terhadap nilai TPAK perempuan kabupaten/kota di Jawa Barat sebagaimana hipotesis penelitian yang dibuat. Hanya saja untuk variabel jumlah industri kecil, menengah dan sedang berpengaruh negatif. Hasil ini berbeda dengan hipotesis penelitian yang menyebutkan bahwa jumlah industri kecil, menengah dan sedang berpengaruh positif terhadap nilai TPAK perempuan. Variabel ini dapat diganti dengan variabel yang dapat memperlihatkan seberapa besar tenaga kerja yang terserap agar sesuai hipotesis. Variabel yang memiliki kontribusi terbesar dalam mempengaruhi nilai TPAK perempuan di Jawa Barat adalah besarnya upah minimum regional pada setiap kabupaten/kota.
-

2.3 Kerangka Konseptual



Keterangan:

- - - - - = Ruang Lingkup Penelitian
- = Mempengaruhi

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual (Sumber: Olahan peneliti)

Pembangunan ekonomi Malthus menyebutkan bahwa perkembangannya dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi menjelaskan adanya perbedaan pendapatan nasional secara potensial dan aktual, tetapi masalahnya bagaimana suatu negara mencapai pada tingkat pendapatan nasional potensial yang tinggi. Malthus menyebutkan adanya faktor non ekonomi dalam pembangunan ekonomi, yaitu politik dan moral. Faktor tersebut adalah keamanan atas kekayaan, konstitusi dan hukum yang baik dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, kerja keras dan kebiasaan teratur, serta sifat jujur pada umumnya. Pendapatan nasional tergantung pada tanah, tenaga kerja, investasi, dan organisasi. Keempat faktor ini akan memaksimalkan produksi sehingga meningkatkan pendapatan nasional. Investasi merupakan kegiatan ekonomi suatu negara untuk menggerakkan roda perekonomian serta menyejahterakan masyarakat dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor yang banyak memerlukan tenaga kerja. Jika investasi ditanamkan pada sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja seperti industri pengolahan dan jasa, maka keinginan wanita masuk ke pasar kerja akan meningkat.

Malthus mengatakan pertumbuhan penduduk seperti deret ukur, sedangkan pertumbuhan sumber daya seperti deret hitung. Artinya, pertumbuhan penduduk akan meningkat lebih cepat ibarat deret ukur. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja yang juga akan meningkatkan angkatan kerja di suatu negara. Jika angkatan kerja meningkat tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang tinggi maka akan menyebabkan pengangguran meningkat karena sumber daya alam terbatas menimbulkan produktivitas rendah, menyebabkan kesempatan kerja berkurang sedangkan angkatan kerja berkembang sangat pesat dan pada akhirnya pengangguran meningkat (Kuntiarti, 2017, Hartanto, 2017, dan Basuki, 2016). Upah minimum juga memiliki hubungan dengan angkatan kerja untuk dapat terserap ke pasar kerja. Tingginya upah minimum maka semakin sedikit kesempatan kerja untuk wanita masuk ke dalam pasar kerja. Perusahaan cenderung akan mempertahankan pekerja lama dan meningkatkan upah sesuai upah minimum mengingat hal itu akan meningkatkan

produktivitas tenaga kerja sehingga tidak akan menyerap tenaga kerja baru. Berdasarkan hal tersebut, wanita yang bersekolah atau mengurus rumah tangga tidak akan masuk dalam angkatan kerja dan otomatis tidak akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini, yaitu:

1. Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita di Indonesia 2012-2016.
2. Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita di Indonesia 2012-2016.
3. Jumlah Penduduk Wanita yang Bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita di Indonesia 2012-2016.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian eksplanatori, Menurut Sugiyono (2012) penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain. Sedangkan karakteristik penelitian ini bersifat replikasi, sehingga hasil uji hipotesis harus didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yang diulang dengan kondisi lain yang kurang lebih sama.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena analisis yang digunakan menggunakan alat statistik ekonomi yang akan menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Digunakannya pendekatan kuantitatif juga karena penelitian ini menggunakan data angkatan kerja berupa angka-angka yang diperoleh dari BPS.

3.2 Unit Analisis

Unit analisis adalah suatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti (Suprayogo, 2001). Unit analisis penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus dan permasalahannya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja wanita di 33 Provinsi di Indonesia tahun 2012-2016.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2012).

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2012). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan berupa laporan data tentang Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia dari tahun 2012-2016 dalam bentuk katalog yang diterbitkan oleh BPS. Sumber data yang digunakan BPS untuk mendapatkan data ketenagakerjaan yaitu melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). Data Upah Minimum Provinsi 33 Provinsi tahun 2012-2016 berasal dari BPS dan kabarpurabaya.com. Data Investasi 33 Provinsi tahun 2012-2016 berasal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan BPS. Data Jumlah Penduduk Wanita yang Bekerja 33 Provinsi tahun 2012-2016 berasal dari BPS.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Regresi Data Panel

Data panel merupakan kombinasi data *cross section* dengan *time series*. Jika setiap unit *cross section* memiliki jumlah observasi *time series* yang sama maka disebut sebagai balanced panel (total jumlah observasi = $N \times T$). Sebaliknya jika jumlah observasi berbeda untuk setiap unit *cross section* maka disebut unbalanced panel.

Menurut Gujarati (2004), keunggulan penggunaan data panel memberikan banyak keuntungan diantaranya sebagai berikut:

1. Data panel mampu menyediakan data yang lebih banyak, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap. Sehingga diperoleh *degree of freedom (df)* yang lebih besar sehingga estimasi yang dihasilkan lebih baik.
2. Dengan menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul karena ada masalah penghilangan variabel (*omitted variable*).

3. Data panel mampu mengurangi kolinearitas antarvariabel.
4. Data panel lebih baik dalam mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak mampu dilakukan oleh data *time series* murni dan *cross section* murni.
5. Dapat menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks. Sebagai contoh, fenomena seperti skala ekonomi dan perubahan teknologi.
6. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregat individu, karena data yang diobservasi lebih banyak.

Model dasar yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita
X1 = Upah Minimum Provinsi (UMP)
X2 = Investasi
X3 = Jumlah Penduduk Wanita yang Bekerja
 α = Konstanta
e = *Error term*, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Analisis regresi data panel memiliki tiga macam model yaitu : model *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*.

1. *Common Effect Model*

Model *Common Effect* merupakan model sederhana yaitu menggabungkan seluruh data *time series* dengan *cross section*, selanjutnya dilakukan estimasi model dengan menggunakan OLS (*Ordinary Least Square*). Model ini menganggap bahwa intersep dan slop dari setiap variabel sama untuk setiap obyek observasi. Dengan kata lain, hasil regresi ini dianggap berlaku untuk semua provinsi pada semua waktu. Kelemahan model ini adalah ketidakseuaian model dengan keadaan sebenarnya. Kondisi tiap obyek dapat berbeda dan kondisi suatu obyek satu waktu dengan waktu yang lain dapat berbeda. Model *Common Effect* dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$y_{it} = \alpha + \beta_j x_{it}^j + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

y_{it} = variabel dependen di waktu t untuk unit cross section i

α = intersep

β_j = parameter untuk variabel ke-j

x_{it}^j = variabel bebas j di waktu t untuk unit cross section i

ε_{it} = komponen error di waktu t untuk unit cross section i

i = urutan provinsi yang diobservasi (cross section)

t = periode waktu (time series)

j = urutan variabel

2. Fixed Effect Model (FEM)

Model data panel dengan *Fixed Effects Model* (FEM) mengasumsikan bahwa perbedaan mendasar antarindividu dapat diakomodasikan melalui perbedaan intersepnnya, namun intersep antarwaktu sama (time invariant). *Fixed effect* maksudnya bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antarindividu dan antarwaktu.

Intersep setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akandiestimasi. Pada umumnya dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*), sehingga FEM sering disebut dengan *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

$$y_{it} = \alpha + \beta_j x_{it}^j + \sum_{i=2}^n \alpha_i D_i + \varepsilon_{it}$$

y_{it} = variabel terikat di waktu t untuk unit cross section i

α = intersep yang berubah-ubah antar-cross section unit

β_j = parameter untuk variabel ke-j

x_{it}^j = variabel bebas j di waktu t untuk unit cross section i

D_i = dummy variable

ε_{it} = komponen error di waktu t untuk unit cross section i

3. *Random Effect Model* (REM)

Random Effect Model (REM) digunakan untuk mengatasi kelemahan model efek tetap yang menggunakan *dummy variable*, sehingga model mengalami ketidakpastian. Penggunaan *dummy variable* akan mengurangi derajat bebas (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. REM menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antawaktu dan antarindividu. Sehingga REM mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki perbedaan intersep yang merupakan variabel random.

Model REM secara umum dituliskan sebagai berikut:

$$\hat{y}_{it} = \alpha + \beta_j x_{it}^j + \varepsilon_{it}$$

$$\varepsilon_{it} = u_i + v_t + w_{it}$$

$u_i \sim N(0, \sigma_u^2)$ = merupakan komponen *cross-section error*

$v_t \sim N(0, \sigma_v^2)$ = merupakan komponen *time series error*

$w_{it} \sim N(0, \sigma_w^2)$ = merupakan *time series* dan *cross section error*

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah nilai residual dari model yang dibentuk berdistribusi normal atau tidak. Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan *Jarque-Bera test*.

Hipotesis dalam pengujian adalah

H_0 : *error term* mengikuti distribusi normal

H_A : *error term* tidak mengikuti distribusi normal.

Pedoman dari JB test adalah:

1. Jika nilai $JB_{statistik} \leq$ nilai X^2_{tabel} atau nilai probabilitas $JB_{statistik} >$ nilai kritis ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis nol (H_0) diterima.
2. Jika nilai $JB_{statistik} >$ nilai X^2_{tabel} atau nilai probabilitas $JB_{statistik} \leq$ nilai kritis ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan menerima (H_A).

2. Uji Heteroskedastisitas

Diagnosis adanya heteroskedastisitas secara kuantitatif dalam suatu regresi dilakukan dengan melakukan pengujian korelasi uji Glejser (*Glejser Test*). Uji ini dilakukan dengan membuat model regresi yang melibatkan nilai absolut residual, sebagai variabel dependen, terhadap semua variabel independen (Algifari, 2011). Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai p-value dengan tingkat signifikansi yang digunakan.

1. H_0 : Varian dari nilai sisa tidak sama antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya, dengan kata lain tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
2. H_A : Varian dari nilai sisa sama antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya, dengan kata lain terjadi masalah heteroskedastisitas.

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan p-value dengan tingkat signifikansi yang digunakan.

1. Jika nilai $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $t_{\text{statistik}} \leq$ nilai kritis ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis nol (H_0) diterima.
2. Jika nilai $t_{\text{statistik}} \leq t_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $t_{\text{statistik}} >$ nilai kritis ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan menerima (H_A).

3. Uji Multikolinieritas

Model yang dipilih harus terbebas dari multikolinieritas atau dapat dikatakan bahwa tidak ada korelasi tinggi antara variabel-variabel independen. Cara umum untuk mendeteksi adanya multikolinieritas melihat bahwa R^2 yang tinggi akan tetapi nilai t-statistik kecil bahkan cenderung tidak signifikan. Uji multikolinieritas juga dapat dideteksi dengan menggunakan nilai matrik korelasi. Apabila nilai matrik korelasi melebihi 80% (0,8) maka variabel-variabel bebasnya memiliki hubungan yang tinggi dan cenderung terkena multikolinieritas (Gujarati, 2004).

3.4.3 Pemilihan Model Estimasi Regresi dalam Data Panel

Pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji F untuk memilih model mana yang terbaik diantara ketiga model tersebut dilakukan uji Chow dan

uji Hausman. Uji Chow dilakukan untuk menguji antara model *common effect* dan *fixed effect*, sedangkan uji Hausman dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan menggunakan *fixed effect* atau *random effect*, pengujian tersebut dilakukan dengan Eviews 9.

1. Uji Chow

Dalam melakukan uji Chow, data diregresikan dengan menggunakan model *common effect* dan *fixed effect* terlebih dahulu kemudian dibuat hipotesis untuk diuji. Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

Ho : maka digunakan model *common effect* (model pool)

Ha : maka digunakan model *fixed effect* dan lanjut uji Hausman

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Chow adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probability $F \geq 0,05$ artinya Ho diterima ; maka model *common effect*
2. Jika nilai probability $F < 0,05$ artinya Ho ditolak ; maka model *fixed effect*, dan dilanjutkan dengan uji Hausman untuk memilih apakah menggunakan *fixed effect* atau metode *random effect*.

2. Uji Hausman

Selanjutnya untuk menguji Hausman Test data juga diregresikan dengan model *random effect* dengan membuat hipotesis:

Ho : maka, model *random effect*

Ha : maka, model *fixed effect*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Hausman adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probability Chi-square $\geq 0,05$, maka Ho diterima, yang artinya model *random effect*.
2. Jika nilai probability Chi-square $< 0,05$, maka Ha diterima, yang artinya model *fixed effect*.

3.4.4 Pengujian Parameter Model / Uji Hipotesis

Pengujian parameter model bertujuan untuk mengetahui kelayakan model dan apakah koefisien yang diestimasi telah sesuai dengan teori atau hipotesis. Pengujian ini meliputi koefisien determinasi (R^2), uji koefisien regresi parsial (uji t) dan uji koefisien regresi secara menyeluruh (F-test/uji F).

1. Uji-F

Uji-F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam uji-F adalah :

H_0 : Variasi perubahan nilai variabel independen tidak dapat menjelaskan variasi perubahan nilai variabel dependen.

H_A : Variasi perubahan nilai variabel independen dapat menjelaskan variasi perubahan nilai variabel dependen

Kriteria pengujian:

1. Jika nilai F statistik \leq F tabel atau probabilitas F-statistik $>$ nilai kritis ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis nol (H_0) diterima.
2. Jika nilai F statistik $>$ F tabel atau probabilitas F-statistik \leq nilai kritis ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan menerima hipotesis alternative (H_A) (Algifari, 2011).

2. Uji-t

Uji t statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen.

Perumusan hipotesis:

H_0 : Secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H_A : Secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Kriteria pengujian:

1. Jika nilai t statistik $\leq t$ tabel atau probabilitas t statistik $>$ nilai kritis ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis nol (H_0) diterima.
2. Jika nilai F statistik $> F$ tabel atau probabilitas F -statistik \leq nilai kritis ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan menerima hipotesis alternative (H_A) (Algifari, 2011).

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*Goodness of Fit*) merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai R^2 mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen (Y) dapat diterangkan oleh variabel independen (X) atau seberapa besar keragaman variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model. Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen (dengan kata lain semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sebaliknya, semakin mendekati satu besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen (dengan kata lain semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen) (Algifari, 2011).

3.5 Definisi Operasional Variabel

Menurut Supranto (2001), definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian, sehingga dapat terhindar kesalahpahaman permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita (Y) adalah ukuran proporsi penduduk wanita usia kerja yang terlibat aktif dipasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan ukuran relatif

dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa (BPS, 2012: 45). Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja wanita yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja wanita di 33 provinsi di Indonesia tahun 2012-2016 dengan satuan persen/tahun..

2. Upah Minimum Provinsi (X1) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Data Upah Minimum Provinsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Upah Minimum Provinsi di 33 provinsi di Indonesia tahun 2012-2016 dengan satuan juta rupiah/bulan.
3. Investasi (X2) adalah investasi yang dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah di dalam negeri maupun di luar negeri. Investasi terdiri dari investasi swasta yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dan investasi pemerintah berasal dari belanja modal pemerintah provinsi yang terdapat pada APBD provinsi. Satuan yang digunakan dalam variabel investasi dalam negeri ini adalah juta rupiah/tahun.
4. Jumlah Penduduk Wanita yang Bekerja (X3) adalah jumlah penduduk wanita yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia 2012-2016. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Upah Minimum Provinsi (UMP) maka semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia tahun 2012-2016.
2. Investasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia 2012-2016. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi investasi dalam negeri maka semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia tahun 2012-2016.
3. Jumlah wanita yang bekerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia 2012-2016. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi jumlah wanita yang bekerja maka semakin bertambah tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia tahun 2012-2016.

5.2 Saran

Di dalam negara berkembang, tidak banyak diantara kaum wanita yang berhasil mendapatkan pekerjaan permanen yang diinginkannya di sektor formal, yang pada umumnya masih didominasi kaum pria. Sebagai konsekuensinya, kaum wanita membanjiri sektor informal. Mereka terpaksa menerima pekerjaan-pekerjaan tidak tetap yang yang berpendapatan rendah, tanpa adanya tunjangan-tunjangan kesejahteraan atau jaminan keselamatan kerja.

Banyak wanita pekerja yang menjalankan usaha secara kecil-kecilan, yang disebut unit usaha mikro, yang memerlukan sedikit sekali modal. Produk yang paling sering digeluti adalah makanan buatan sendiri atau barang-barang kerajinan tangan. Sebenarnya kalau dihitung dari jumlah modal yang digunakan, tingkat

pengembalian atau *rate of returns* unit usaha mikro yang ditekuni oleh kaum wanita itu sangat tinggi. Hanya saja tenaga dan waktu yang mereka curahkan sangat banyak, sehingga apabila dihitung berdasarkan rasio modal-tenaga kerja, tingkat produktivitas mereka sangat rendah. Berbagai studi yang pernah diadakan di Amerika Latin dan Asia mengenai hal itu mendapati bahwa seandainya kaum wanita itu bisa memperoleh kredit untuk membiayai unit usaha mikronya, mereka akan mampu mendapatkan tingkat keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa diraih oleh kaum pria yang menjalankan usaha yang sama. Karena kaum wanita mampu mencetak lebih banyak pendapatan dari sejumlah modal, maka tingkat pengembalian investasi (*rates of return on investment*) mereka jauh lebih tinggi daripada kaum pria.

Meskipun sejumlah program penyediaan kredit khusus bagi kaum wanita terbukti sangat berhasil, sampai sekarang sumber-sumber kredit yang tersedia bagi mereka masih sangat sedikit. Hampir seluruh kredit yang ada disalurkan melalui lembaga-lembaga resmi atau instansi di sektor formal. Akibatnya, kaum wanita begitu sulit mendapatkan kredit, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Sejauh ini, program-program yang dijalankan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan kelompok penduduk justru mengabaikan keluarga-keluarga yang paling membutuhkannya. Sebagian besar kredit dari pemerintah tercurah ke sektor formal yang umumnya didominasi oleh kaum pria, dan alokasi sumber daya terpenting hanya dilakukan oleh lembaga dari sektor formal. Untuk menanggulangi kemiskinan yang banyak diserita oleh wanita, pemerintah harus berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengintegrasikan kaum wanita ke dalam setiap program ekonominya. Agar mereka dapat turut terlibat secara penuh dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sekaligus berkesempatan untuk turut menikmati hasil-hasilnya, maka segala kendala dan keterbatasan yang masih mereka hadapi harus diperhitungkan dalam setiap perumusan kebijakan.

Legalisasi dan promosi ekonomis atas berbagai kegiatan di sektor informal, di mana sebagian besar kaum wanita yang bekerja akan melipatgandakan fleksibilitas finansial kaum wanita dan sekaligus memacu tingkat produktivitas unit-unit usaha mikro yang mereka kelola. Namun, agar

mereka benar-benar dapat memanfaatkan kesempatan tersebut, pemerintah juga harus mengendurkan aneka peraturan yang membatasi hak kepemilikan oleh wanita, yang mengalami kendala dalam melakukan transaksi ekonomi, mengikuti program-program pendidikan dan latihan. Yang terakhir, program kesehatan anak dan keluarga berencana perlu diintensifkan agar kaum wanita bisa sedikit mengendurkan fungsi reproduksinya dan memanfaatkan lebih banyak waktu untuk meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.



DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 2011. *Analisis Regresi Teori, Kasus, dan Solusi*. Yogyakarta: BPFE
- Ananta, Aris. 2000. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE UI
- Arfida, BR. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. 2016. *Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan IV dan Januari –Desember Tahun 2016*. Jakarta : BKPM
- Boediono. 2011. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta : BPFE
- BPS. 1980. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia 1961-1980*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BPS. 2010. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia 2010*. Jakarta : BPS
- BPS. 2013. *Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010*. Jakarta : BPS
- BPS. 2015. *Tabel Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Provinsi 1 (juta US\$), 2006 – 2015*. Jakarta : BPS
- BPS. 2015. *Tabel Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi 1 (miliar rupiah), 2006-2015*. Jakarta : BPS
- BPS. 2016. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia 2016*. Jakarta : BPS
- BPS. 2016. *Profil Penduduk Indonesia Hasil Supas 2016*. Jakarta : BPS
- BPS. 2016. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2012-2015*. Jakarta : BPS
- BPS. 2016. *Upah Minimum Propinsi*. Jakarta : BPS
- BPS. 2017. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2013-2016*. Jakarta : BPS
- BPS. 2018. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2014-2017*. Jakarta : BPS
- Djoko, Sri *et al.* 2015. *Mobilitas Penduduk dan Bonus Demografi*. Bandung: Unpad Press
- Gujarati, Damodar N. 2011. *Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat

- International Labour Organization. (2013). *Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2013: Memperkuat peran pekerjaan layak dalam kesetaraan pertumbuhan*. Kantor Perburuhan Internasional – Jakarta: ILO.
- Jhingan, M.L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Rajawali Press
- Kauffman dan Hotckiss, Julie. 1999. *The Economic Of Labor Market, Fifth Edition*. The Dryden Press
- Mankiw, N. Georgory. 2003. *Teori Makro Ekonomi Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga
- Mc Connell, Brue, dan Macpherson. 1999. *Contemporary Labor Economics*. New York: Irwin/McGraw-Hill
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum
- Rosyidi. 2006. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Makro dan Mikro (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE UI.
- Sholeh, Maimun. 2007. *Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah: Teori Serta Beberapa Potretnya di Indonesia*. *Junal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 4. No. 1
- Subri, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2006. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Sulistiawati, Rini. 2012. *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia*. *Jurnal Eksos*, Vol8. No. 3, Oktober 2012
- Supranto, J. 2001. *Statistik Teori dan Aplikasi., Cetakan Kedua*. Jakarta: Erlangga

Suprayogo, I. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Rosdakarya

Suroto. 1992. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja, Edisi 2*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Swasono, Yudo & Sulistyarningsih, Endang. 1987. *Metode Perencanaan Tenaga Kerja*. Yogyakarta : BPFE

Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



Lampiran A. Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, Investasi, Jumlah Penduduk Wanita yang Bekerja di 33 Provinsi di Indonesia 2012-2016

Provinsi_Tahun	TPAK Wanita (%/tahun)	UMP (Juta Rp/bulan)	Investasi (Juta Rp/tahun)	Penduduk W Bekerja (juta jiwa/tahun)
Aceh_2012	47,54	1,4	2533409,378	0,6820095
Aceh_2013	46,805	1,55	6428978,151	0,683492
Aceh_2014	46,91	1,75	7892758,166	0,722314
Aceh_2015	49,145	1,9	6508358,676	0,7630395
Aceh_2016	47,265	2,1185	6539082,801	0,7606605
Sumut_2012	57,645	1,2	9562984,198	2,375565
Sumut_2013	58,17	1,375	16593222,42	2,4285175
Sumut_2014	56,23	1,50585	12187674,63	2,4559405
Sumut_2015	54,73	1,625	22323578,09	1,168159
Sumut_2016	54,075	1,811875	19449579,44	2,445463
Sumbar_2012	52,295	1,15	2252563,542	0,8403125
Sumbar_2013	52,15	1,35	2477788,799	0,847852
Sumbar_2014	53,435	1,49	2594561,724	0,900652
Sumbar_2015	52,85	1,615	3124852,503	0,901471
Sumbar_2016	56,485	1,800725	5845691,472	0,99498
Riau_2012	43,02	1,238	18505269,21	0,7652985
Riau_2013	46,755	1,4	22945434,23	0,8656605
Riau_2014	44,645	1,7	25282915,3	0,847914
Riau_2015	46,735	1,878	20926027,64	0,8980405
Riau_2016	47,665	2,095	20268333,73	0,953408
Jambi_2012	48,215	1,1425	3628365,376	0,5052875
Jambi_2013	46,96	1,3	4153576,47	0,5054045
Jambi_2014	47,105	1,5023	2362288,464	0,5197935
Jambi_2015	50,58	1,71	5810269,403	0,57933
Jambi_2016	49,885	1,90665	5645448,007	0,577056

Lanjutan Lampiran A

Sumsel_2012	56,005	1,19522	11514473,7	1,381115
Sumsel_2013	54,15	1,63	10151898,87	1,375858
Sumsel_2014	55,125	1,825	20851768,69	1,4725205
Sumsel_2015	53,785	1,974346	20849657,26	1,436609
Sumsel_2016	55,295	2,206	46488142,43	1,532266
Bengkulu_2012	59,15	0,93	635373,459	0,3427185
Bengkulu_2013	56,3	1,2	657432,38	0,330299
Bengkulu_2014	57,95	1,35	551748,938	0,3615605
Bengkulu_2015	57,82	1,5	1315556,104	0,3600735
Bengkulu_2016	60,655	1,605	2079721,159	0,3902295
Lampung_2012	50,515	0,975	2235945,26	1,23458
Lampung_2013	48,79	1,15	2696979,725	1,2176905
Lampung_2014	50,035	1,399037	6358311,683	1,3116675
Lampung_2015	48,75	1,581	5508843,016	1,3043475
Lampung_2016	51,17	1,763	8183303,105	1,3970265
Bangkabelitung_2012	44,28	1,11	1393903,288	0,185314
Bangkabelitung_2013	47,725	1,265	2374153,777	0,205413
Bangkabelitung_2014	44,685	1,64	2220743,488	0,197341
Bangkabelitung_2015	50,26	2,1	2392090,564	0,2253225
Bangkabelitung_2016	51,925	2,3415	3136323,282	0,2384785
Kep.Riau_2012	47,265	1,015	5473816,487	0,277451
Kep.Riau_2013	48,435	1,365087	4639419,365	0,289512
Kep.Riau_2014	45,69	1,665	5599908,281	0,270882
Kep.Riau_2015	43,59	1,954	9743762,359	0,264785
Kep.Riau_2016	44,215	2,17871	7719863,34	0,281198
Dki Jakarta_2012	57,935	1,52915	56848755,16	1,8928655
Dki Jakarta_2013	52,59	2,2	47875372,99	1,7544945
Dki Jakarta_2014	50,555	2,441	84039971,59	1,7267545
Dki Jakarta_2015	54,165	2,7	75436523,16	1,907901

Lanjutan Lampiran A

Dki Jakarta_2016	52,58	3,1	66612905,82	1,936721
Jabar_2012	43,02	0,78	53034606,64	6,0260875
Jabar_2013	41,875	0,85	96689667,03	5,9844465
Jabar_2014	42,87	1	101311138,6	6,4140855
Jabar_2015	42,87	1	107341136,4	6,552446
Jabar_2016	42,565	1,312355	106360017,7	6,703236
Jateng_2012	58,105	0,765	8732087,31	6,6463475
Jateng_2013	57,615	0,83	19219370,92	6,624587
Jateng_2014	57,205	0,91	20908244,61	6,9099715
Jateng_2015	56,88	0,91	29597953,61	7,0042885
Jateng_2016	55,795	1,265	40666843,38	7,0384135
Diy_2012	61,455	0,89266	1367327,782	0,832884
Diy_2013	60,175	0,947114	1012184,594	0,8206475
Diy_2014	63,92	0,9885	1949678,674	0,9077035
Diy_2015	62,51	0,9885	2213035,197	0,8506095
Diy_2016	62,775	1,2377	2047506,112	0,917128
Jatim_2012	54,725	0,745	44696718,78	7,675176
Jatim_2013	55,67	0,86625	77214977,45	7,8570235
Jatim_2014	54,745	1	61650801,62	7,9294685
Jatim_2015	53,815	1	73344811,09	7,8635315
Jatim_2016	52,955	1,23749	74431423,11	7,754927
Banten_2012	47,44	1,042	32171437,71	1,6379815
Banten_2013	46,575	1,17	49940560,78	1,655692
Banten_2014	45,795	1,325	33957063,19	1,6886835
Banten_2015	45,515	1,6	47036925,74	1,7370485
Banten_2016	46,62	1,784	52692298,48	1,841739
Bali_2012	70,155	0,9675	8089437,987	1,032954
Bali_2013	69,605	1,181	8180004,744	1,0469055
Bali_2014	69,845	1,5426	5910029,108	1,0622715

Lanjutan Lampiran A

Bali_2015	69,645	1,621172	8618579,737	1,073143
Bali_2016	68,17	1,8076	7237295,638	1,0701125
Ntb_2012	54,845	1	6568060,776	0,8554215
Ntb_2013	54,96	1,1	7769168,79	0,873394
Ntb_2014	55,5	1,21	7456813,23	0,9218895
Ntb_2015	57,445	1,33	10782078,16	0,975805
Ntb_2016	60,665	1,48295	7908472,646	1,0604685
Ntt_2012	62,72	0,925	342861,865	0,949005
Ntt_2013	61,84	1,01	362847,576	0,9543285
Ntt_2014	61,965	1,15	598108,589	1,0020155
Ntt_2015	61,735	1,25	2861177,42	1,002168
Ntt_2016	61,78	1,425	2202574,846	1,028384
Kalbar_2012	59,54	0,9	6990225,208	0,851423
Kalbar_2013	57,435	1,06	10895811,46	0,8293485
Kalbar_2014	57,22	1,38	16769405,21	0,896656
Kalbar_2015	56,05	1,56	24846124,05	0,8903225
Kalbar_2016	55,15	1,7394	17922132,96	0,8893825
Kalteng_2012	54,685	1,327459	10214077,66	0,3930075
Kalteng_2013	52,605	1,553127	8616747,426	0,389353
Kalteng_2014	53,195	1,72397	13566385,82	0,421176
Kalteng_2015	55,63	1,896367	15043446,38	0,449738
Kalteng_2016	53,275	2,057558	14420190,59	0,4371
Kalsel_2012	55,76	1,225	6985487,108	0,6978575
Kalsel_2013	55,145	1,3375	12799615,45	0,7133295
Kalsel_2014	55,205	1,62	10103328,99	0,7322415
Kalsel_2015	56,51	1,87	16475603,98	0,757024
Kalsel_2016	57,065	2,08505	10845624,87	0,779469
Kaltim_2012	45,15	1,177	27785535,91	0,5055745
Kaltim_2013	43,905	1,752073	35881463,02	0,509951

Lanjutan Lampiran A

Kaltim_2014	45,845	1,886315	41629791,92	0,543768
Kaltim_2015	43,745	2,026126	44309907,93	0,461648
Kaltim_2016	46,715	2,161253	23692227,03	0,514771
Sulut_2012	45	1,25	1478444,118	0,323328
Sulut_2013	40,665	1,55	1250745,985	0,3022815
Sulut_2014	42,485	1,9	1807718,518	0,3254885
Sulut_2015	44,65	2,15	2235180,975	0,341234
Sulut_2016	47,005	2,4	10933152,79	0,3724575
Sultengah_2012	52,855	0,885	8687805,323	0,443024
Sultengah_2013	50,55	0,995	11330259,05	0,44019
Sultengah_2014	52,51	1,25	18867839,41	0,494901
Sultengah_2015	51,245	1,5	16305934,36	0,491649
Sultengah_2016	57,475	1,67	22979583,71	0,5570645
Sulsel_2012	46,225	1,2	8301829,113	1,2550365
Sulsel_2013	44,175	1,44	7024052,349	1,233467
Sulsel_2014	44,445	1,8	9102817,409	1,2869515
Sulsel_2015	44,495	2	13267545,72	1,3238175
Sulsel_2016	46,38	2,25	9171416,244	1,4078505
Sultenggara_2012	55,44	1,0323	1455008,583	0,400236
Sultenggara_2013	52,61	1,125207	2740176,08	0,38654
Sultenggara_2014	54,65	1,4	3806153,53	0,427012
Sultenggara_2015	55,875	1,652	4689311,122	0,437526
Sultenggara_2016	60,675	1,85	7574198,023	0,49952
Gorontalo_2012	44,115	0,8375	642954,174	0,1519825
Gorontalo_2013	43,71	1,175	581048,938	0,155489
Gorontalo_2014	47,275	1,325	328274,543	0,180459
Gorontalo_2015	48,19	1,6	533551,8388	0,1869825
Gorontalo_2016	52,975	1,875	2669209,258	0,2112655
Sulbar_2012	57,695	1,127	365911,412	0,2192225

Lanjutan Lampiran A

Sulbar_2013	55,275	1,165	898871,336	0,2170285
Sulbar_2014	57,37	1,4	1158879,662	0,2388805
Sulbar_2015	58,54	1,6555	1576841,43	0,248024
Sulbar_2016	57,235	1,864	858236,853	0,248065
Maluku_2012	50,71	0,975	267171,302	0,2376965
Maluku_2013	50,605	1,275	833949,39	0,241198
Maluku_2014	49,325	1,415	531481,706	0,241043
Maluku_2015	50,77	1,65	1673682,937	0,2528515
Maluku_2016	51,685	1,775	2215123,75	0,2738885
Maluku Utara_2012	50,515	0,960498	1607954,933	0,1593555
Maluku Utara_2013	48,17	1,200622	4760999,154	0,155817
Maluku Utara_2014	48,255	1,440746	1805973,303	0,1631015
Maluku Utara_2015	50,62	1,577617	3269464,096	0,1765935
Maluku Utara_2016	50,27	1,681266	6469145,171	0,1820965
Papua Barat_2012	55,315	1,45	1207572,751	0,124454
Papua Barat_2013	52,31	1,72	1795006,682	0,129219
Papua Barat_2014	54,595	1,87	3190573,282	0,139926
Papua Barat_2015	54,505	2,015	5290098,219	0,1408865
Papua Barat_2016	54,97	2,237	8335494,152	0,1470665
Papua_2012	68,97	1,585	12933370,67	0,6306045
Papua_2013	69,63	1,71	30427124,85	0,676931
Papua_2014	71,59	2,04	17542909,59	0,6821965
Papua_2015	69,995	2,193	16453572,65	0,684891
Papua_2016	67,315	2,435	18331173,04	0,682084
Indonesia_2012	53,28	1	10863962,01	42,5311765
Indonesia_2013	52,24	1	15491482,13	42,701361
Indonesia_2014	52,67	2	16481698,83	44,39723
Indonesia_2015	53,14	2	18839560,06	43,7113065
Indonesia_2016	53,96	2	19452476,82	46,1239765

Lampiran B. Hasil Olah Log Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, Investasi Dalam Negeri, Investasi Luar Negeri, Jumlah Penduduk Wanita yang Mengurus Rumah Tangga di 33 Provinsi di Indonesia 2012-2016

Prov_Tahun	LOG_TPAKW	LOG_UMP	LOG_I	LOG_JPWB
Aceh_2012	3.861571462	0.336472	14.74508	-0.38271
Aceh_2013	3.845990035	0.438255	15.67633	-0.38054
Aceh_2014	3.848230872	0.559616	15.88146	-0.3253
Aceh_2015	3.894775112	0.641854	15.6886	-0.27045
Aceh_2016	3.855770064	0.750708	15.69331	-0.27357
Sumut_2012	4.054303513	0.182322	16.07341	0.865235
Sumut_2013	4.063369758	0.318454	16.6245	0.887281
Sumut_2014	4.029450422	0.409358	16.31594	0.89851
Sumut_2015	4.002412005	0.485508	16.92115	0.155429
Sumut_2016	3.990371972	0.594362	16.78334	0.894234
Sumbar_2012	3.956900764	0.139762	14.62758	-0.17398
Sumbar_2013	3.954124181	0.300105	14.72288	-0.16505
Sumbar_2014	3.978465962	0.398776	14.76893	-0.10464
Sumbar_2015	3.967457712	0.479335	14.9549	-0.10373
Sumbar_2016	4.033975116	0.588189	15.58122	-0.00503
Riau_2012	3.761665124	0.213497	16.73357	-0.26749
Riau_2013	3.844921202	0.336472	16.94863	-0.14426
Riau_2014	3.798742319	0.530628	17.04564	-0.16498
Riau_2015	3.844493349	0.630207	16.8565	-0.10754
Riau_2016	3.864197376	0.739554	16.82457	-0.04771
Jambi_2012	3.875670176	0.133219	15.10429	-0.68263
Jambi_2013	3.849296176	0.262364	15.23948	-0.6824
Jambi_2014	3.852379153	0.406997	14.67514	-0.65432
Jambi_2015	3.923556241	0.536493	15.57514	-0.54588
Jambi_2016	3.909720356	0.645348	15.54636	-0.54982
Sumsel_2012	4.025440972	0.17833	16.25912	0.322891
Sumsel_2013	3.991757973	0.48858	16.13317	0.319078

Lanjutan Lampiran B

Sumsel_2014	4.009603334	0.60158	16.85295	0.386976
Sumsel_2015	3.984994618	0.680237	16.85285	0.362285
Sumsel_2016	4.012682489	0.791181	17.65471	0.426748
Bengkulu_2012	4.08007659	-0.07257	13.36197	-1.07085
Bengkulu_2013	4.030694535	0.182322	13.3961	-1.10776
Bengkulu_2014	4.05958057	0.300105	13.22085	-1.01733
Bengkulu_2015	4.057334737	0.405465	14.08977	-1.02145
Bengkulu_2016	4.105202072	0.473124	14.54774	-0.94102
Lampung_2012	3.922270322	-0.02532	14.62017	0.210731
Lampung_2013	3.887525374	0.139762	14.80764	0.196956
Lampung_2014	3.912722761	0.335784	15.66527	0.271299
Lampung_2015	3.886705197	0.458058	15.52187	0.265703
Lampung_2016	3.935153423	0.567017	15.91761	0.334346
Bangkabelitung_2012	3.790533108	0.10436	14.14762	-1.6857
Bangkabelitung_2013	3.86545537	0.235072	14.68015	-1.58273
Bangkabelitung_2014	3.799637875	0.494696	14.61335	-1.62282
Bangkabelitung_2015	3.917209532	0.741937	14.68768	-1.49022
Bangkabelitung_2016	3.94980037	0.850792	14.95856	-1.43348
Kep.Riau_2012	3.855770064	0.014889	15.51549	-1.28211
Kep.Riau_2013	3.880222693	0.311218	15.3501	-1.23956
Kep.Riau_2014	3.821879456	0.509825	15.53826	-1.30607
Kep.Riau_2015	3.774827766	0.669879	16.09214	-1.32884
Kep.Riau_2016	3.789064098	0.778733	15.85931	-1.2687
DKI Jakarta_2012	4.059321692	0.424712	17.8559	0.638092
DKI Jakarta_2013	3.962525988	0.788457	17.68411	0.562181
DKI Jakarta_2014	3.923061853	0.892408	18.2468	0.546244
DKI Jakarta_2015	3.992034943	0.993252	18.1388	0.646004
DKI Jakarta_2016	3.962335819	1.131402	18.01441	0.660996
Jabar_2012	3.761665124	-0.24846	17.78646	1.796098
Jabar_2013	3.73468899	-0.16252	18.38702	1.789164

Lanjutan Lampiran B

Jabar_2014	3.758172281	0	18.43371	1.858496
Jabar_2015	3.758172281	0	18.49152	1.879838
Jabar_2016	3.751032319	0.271823	18.48234	1.90259
Jateng_2012	4.062251719	-0.26788	15.98251	1.894067
Jateng_2013	4.05378295	-0.18633	16.77143	1.890788
Jateng_2014	4.046641307	-0.09431	16.85565	1.932966
Jateng_2015	4.040943785	-0.09431	17.20322	1.946523
Jateng_2016	4.02168426	0.235072	17.52092	1.951383
DIY_2012	4.1183052	-0.11355	14.12837	-0.18286
DIY_2013	4.097256984	-0.05434	13.82762	-0.19766
DIY_2014	4.157632301	-0.01157	14.48318	-0.09684
DIY_2015	4.135326544	-0.01157	14.60988	-0.1618
DIY_2016	4.139556905	0.213255	14.53213	-0.08651
Jatim_2012	4.002320643	-0.29437	17.61541	2.037991
Jatim_2013	4.019441402	-0.14358	18.1621	2.061408
Jatim_2014	4.00268604	0	17.937	2.070586
Jatim_2015	3.985552239	0	18.11068	2.062236
Jatim_2016	3.969442496	0.213085	18.12539	2.048328
Banten_2012	3.859465755	0.041142	17.28659	0.493465
Banten_2013	3.841063916	0.157004	17.72634	0.504219
Banten_2014	3.824174915	0.281412	17.34061	0.523949
Banten_2015	3.818041942	0.470004	17.66644	0.552187
Banten_2016	3.842029634	0.578858	17.77998	0.61071
Bali_2012	4.25070708	-0.03304	15.90607	0.032423
Bali_2013	4.242836404	0.166362	15.9172	0.045839
Bali_2014	4.246278501	0.433469	15.59216	0.06041
Bali_2015	4.24341091	0.483149	15.96943	0.070592
Bali_2016	4.222004585	0.592	15.79476	0.067764
NTB_2012	4.004511025	0	15.69773	-0.15616
NTB_2013	4.006605648	0.09531	15.86567	-0.13537

Lanjutan Lampiran B

NTB_2014	4.016383021	0.19062	15.82464	-0.08133
NTB_2015	4.050827968	0.285179	16.1934	-0.02449
NTB_2016	4.105366926	0.394033	15.88345	0.058711
NTT_2012	4.138680376	-0.07796	12.74508	-0.05234
NTT_2013	4.124550404	0.00995	12.80174	-0.04675
NTT_2014	4.12656971	0.139762	13.30153	0.002013
NTT_2015	4.122851031	0.223144	14.86674	0.002166
NTT_2016	4.123579687	0.354172	14.60514	0.027989
Kalbar_2012	4.086648356	-0.10536	15.76002	-0.16085
Kalbar_2013	4.050653874	0.058269	16.20389	-0.18711
Kalbar_2014	4.046903488	0.322083	16.63507	-0.10908
Kalbar_2015	4.02624415	0.444686	17.02821	-0.11617
Kalbar_2016	4.010056746	0.55354	16.70155	-0.11723
Kalteng_2012	4.001589449	0.283267	16.13928	-0.93393
Kalteng_2013	3.962811172	0.44027	15.96922	-0.94327
Kalteng_2014	3.973964407	0.54463	16.42311	-0.8647
Kalteng_2015	4.018722624	0.63994	16.52645	-0.79909
Kalteng_2016	3.975467178	0.72152	16.48414	-0.82759
Kalsel_2012	4.021056766	0.202941	15.75935	-0.35974
Kalsel_2013	4.00996608	0.290802	16.36493	-0.33781
Kalsel_2014	4.011053529	0.482426	16.12838	-0.31164
Kalsel_2015	4.034417614	0.625938	16.61739	-0.27836
Kalsel_2016	4.044190969	0.734793	16.19927	-0.24914
Kaltim_2012	3.80999028	0.162969	17.14003	-0.68206
Kaltim_2013	3.782028209	0.5608	17.39573	-0.67344
Kaltim_2014	3.825266142	0.634625	17.54433	-0.60923
Kaltim_2015	3.778377321	0.706126	17.60672	-0.77295
Kaltim_2016	3.844065312	0.770688	16.98066	-0.66403
Sulut_2012	3.80666249	0.223144	14.2065	-1.12909
Sulut_2013	3.705367772	0.438255	14.03925	-1.1964

Lanjutan Lampiran B

Sulut_2014	3.749151072	0.641854	14.40758	-1.12243
Sulut_2015	3.798854307	0.765468	14.61983	-1.07519
Sulut_2016	3.850253979	0.875469	16.20731	-0.98763
Sultengah_2012	3.967552315	-0.12217	15.97743	-0.81413
Sultengah_2013	3.922962945	-0.00501	16.24299	-0.82055
Sultengah_2014	3.961003628	0.223144	16.75297	-0.7034
Sultengah_2015	3.936618052	0.405465	16.60704	-0.70999
Sultengah_2016	4.051350071	0.512824	16.95012	-0.58507
Sulsel_2012	3.833520777	0.182322	15.93199	0.227165
Sulsel_2013	3.788159018	0.364643	15.76485	0.209829
Sulsel_2014	3.79425247	0.587787	16.02409	0.252276
Sulsel_2015	3.795376823	0.693147	16.40083	0.28052
Sulsel_2016	3.836868332	0.81093	16.0316	0.342064
Sultenggara_2012	4.015301355	0.031789	14.19052	-0.9157
Sultenggara_2013	3.962906216	0.117967	14.82353	-0.95052
Sultenggara_2014	4.000949215	0.336472	15.15213	-0.85094
Sultenggara_2015	4.023117053	0.501987	15.3608	-0.82662
Sultenggara_2016	4.105531752	0.615186	15.84026	-0.69411
Gorontalo_2012	3.786799861	-0.17733	13.37383	-1.88399
Gorontalo_2013	3.777576909	0.161268	13.27259	-1.86118
Gorontalo_2014	3.855981615	0.281412	12.70161	-1.71225
Gorontalo_2015	3.875151531	0.470004	13.18731	-1.67674
Gorontalo_2016	3.969820104	0.628609	14.79729	-1.55464
Sulbar_2012	4.055170515	0.119559	12.81015	-1.51767
Sulbar_2013	4.012320727	0.152721	13.7089	-1.52773
Sulbar_2014	4.049521519	0.336472	13.96296	-1.43179
Sulbar_2015	4.069710281	0.504103	14.27093	-1.39423
Sulbar_2016	4.047165599	0.622725	13.66264	-1.39406
Maluku_2012	3.92612313	-0.02532	12.49565	-1.43676
Maluku_2013	3.924050386	0.242946	13.63393	-1.42214

Lanjutan Lampiran B

Maluku_2014	3.898431052	0.34713	13.18342	-1.42278
Maluku_2015	3.927305629	0.500775	14.33054	-1.37495
Maluku_2016	3.945167604	0.5738	14.61082	-1.29503
Maluku Utara_2012	3.922270322	-0.0403	14.29047	-1.83662
Maluku Utara_2013	3.874736421	0.18284	15.37597	-1.85907
Maluku Utara_2014	3.876499449	0.365161	14.40661	-1.81338
Maluku Utara_2015	3.924346755	0.455915	15.00014	-1.7339
Maluku Utara_2016	3.917408478	0.519547	15.68255	-1.70322
Papua Barat_2012	4.013044119	0.371564	14.00412	-2.08382
Papua Barat_2013	3.957187557	0.542324	14.40052	-2.04625
Papua Barat_2014	3.999942303	0.625938	14.97571	-1.96664
Papua Barat_2015	3.998292441	0.700619	15.48135	-1.9598
Papua Barat_2016	4.006787582	0.805136	15.93603	-1.91687
Papua_2012	4.233671627	0.460584	16.37532	-0.46108
Papua_2013	4.243195509	0.536493	17.23085	-0.39019
Papua_2014	4.270955399	0.71295	16.68016	-0.38244
Papua_2015	4.248423811	0.78527	16.61605	-0.3785
Papua_2016	4.209383094	0.889947	16.72411	-0.3826

Lampiran C

Hasil Estimasi Panel Data Model Common Effect Model

Dependent Variable: LOG_TPAKW

Method: Panel Least Squares

Date: 07/15/18 Time: 13:25

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.515867	0.163189	27.67259	0.0000
LOG_UMP	0.045752	0.039349	1.162731	0.2467
LOG_I	-0.035182	0.010549	-3.334958	0.0011
LOG_JPWB	0.048533	0.015037	3.227581	0.0015
R-squared	0.075388	Mean dependent var	3.963451	
Adjusted R-squared	0.058159	S.D. dependent var	0.125885	
S.E. of regression	0.122170	Akaike info criterion	-1.342866	
Sum squared resid	2.402999	Schwarz criterion	-1.267570	
Log likelihood	114.7864	Hannan-Quinn criter.	-1.312301	
F-statistic	4.375667	Durbin-Watson stat	0.130208	
Prob(F-statistic)	0.005437			

Lampiran D

Hasil Estimasi Panel Data Model Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG_TPAKW

Method: Panel Least Squares

Date: 07/15/18 Time: 13:30

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.930745	0.099046	39.68616	0.0000
LOG_UMP	-0.034539	0.014993	-2.303620	0.0228
LOG_I	0.007984	0.006338	1.259755	0.2100
LOG_JPWB	0.263188	0.033633	7.825275	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.961265	Mean dependent var	3.963451
Adjusted R-squared	0.950755	S.D. dependent var	0.125885
S.E. of regression	0.027935	Akaike info criterion	-4.127612
Sum squared resid	0.100670	Schwarz criterion	-3.449951
Log likelihood	376.5280	Hannan-Quinn criter.	-3.852526
F-statistic	91.46576	Durbin-Watson stat	2.091736
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran E

Hasil Estimasi Panel Data Model Random Effect Model

Dependent Variable: LOG_TPAKW

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/15/18 Time: 13:31

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.946991	0.098302	40.15170	0.0000
LOG_UMP	0.009930	0.013422	0.739842	0.4605
LOG_I	0.002438	0.006133	0.397543	0.6915
LOG_JPWB	0.083345	0.018598	4.481308	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.122956	0.9509
Idiosyncratic random			0.027935	0.0491
Weighted Statistics				
R-squared	0.128636	Mean dependent var	0.400648	
Adjusted R-squared	0.112399	S.D. dependent var	0.033387	
S.E. of regression	0.031455	Sum squared resid	0.159297	
F-statistic	7.922578	Durbin-Watson stat	1.351307	
Prob(F-statistic)	0.000058			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.348399	Mean dependent var	3.963451	
Sum squared resid	3.504388	Durbin-Watson stat	0.061426	

Lampiran F

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	92.194953	(32,129)	0.0000
Cross-section Chi-square	523.483158	32	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 07/13/18 Time: 23:03

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.515867	0.163189	27.67259	0.0000
X1	0.045752	0.039349	1.162731	0.2467
X2	-0.035182	0.010549	-3.334958	0.0011
X3	0.048533	0.015037	3.227581	0.0015
R-squared	0.075388	Mean dependent var	3.963451	
Adjusted R-squared	0.058159	S.D. dependent var	0.125885	
S.E. of regression	0.122170	Akaike info criterion	-1.342866	
Sum squared resid	2.402999	Schwarz criterion	-1.267570	
Log likelihood	114.7864	Hannan-Quinn criter.	-1.312301	
F-statistic	4.375667	Durbin-Watson stat	0.130208	
Prob(F-statistic)	0.005437			

Lampiran G

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: FEM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	46.125324	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.034539	0.009930	0.000045	0.0000
X2	0.007984	0.002438	0.000003	0.0005
X3	0.263188	0.083345	0.000785	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 07/13/18 Time: 23:04

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.930745	0.099046	39.68616	0.0000
X1	-0.034539	0.014993	-2.303620	0.0228
X2	0.007984	0.006338	1.259755	0.2100
X3	0.263188	0.033633	7.825275	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.961265	Mean dependent var	3.963451
Adjusted R-squared	0.950755	S.D. dependent var	0.125885
S.E. of regression	0.027935	Akaike info criterion	-4.127612
Sum squared resid	0.100670	Schwarz criterion	-3.449951
Log likelihood	376.5280	Hannan-Quinn criter.	-3.852526
F-statistic	91.46576	Durbin-Watson stat	2.091736
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran H

Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 07/13/18 Time: 23:02

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.042369	0.123440	0.343236	0.7320
LOG_UMP	-0.016206	0.018686	-0.867284	0.3874
LOG_I	0.003190	0.007898	0.403826	0.6870
LOG_JPWB	-0.033406	0.041917	-0.796973	0.4269

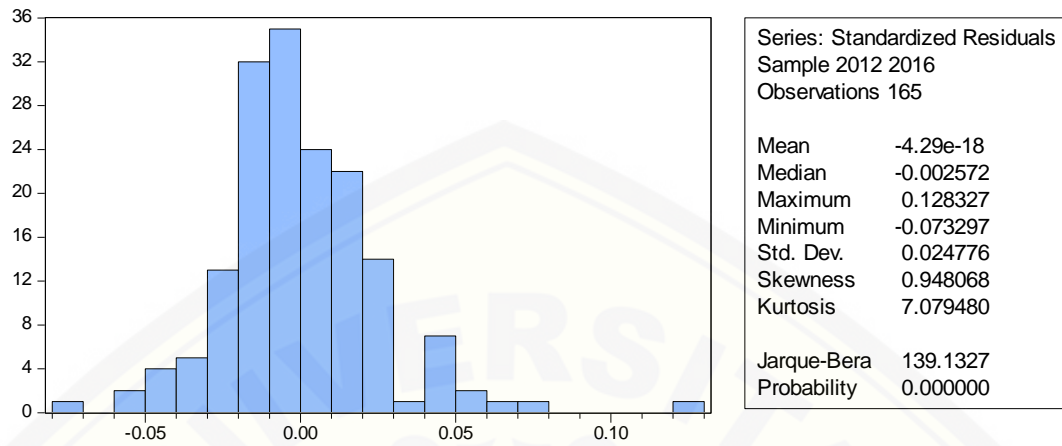
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.816258	Mean dependent var	0.096985
Adjusted R-squared	0.766405	S.D. dependent var	0.072035
S.E. of regression	0.034816	Akaike info criterion	-3.687272
Sum squared resid	0.156364	Schwarz criterion	-3.009611
Log likelihood	340.2000	Hannan-Quinn criter.	-3.412186
F-statistic	16.37341	Durbin-Watson stat	1.790789
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran I

Uji Normalitas



Lampiran J

Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.173073	-0.276878
X2	0.173073	1.000000	0.671177
X3	-0.276878	0.671177	1.000000



Lampiran K

Nilai Log Koefisien dan Antilog Koefisien

Variabel	Log	Antilog
Konstanta	3.930745	8525.993555
Upah Minimum Provinsi	0.034539	1.082776945
Investasi	0.007984	1.018553862
Jumlah Penduduk Wanita yang Bekerja	0.263188	1.833107777

